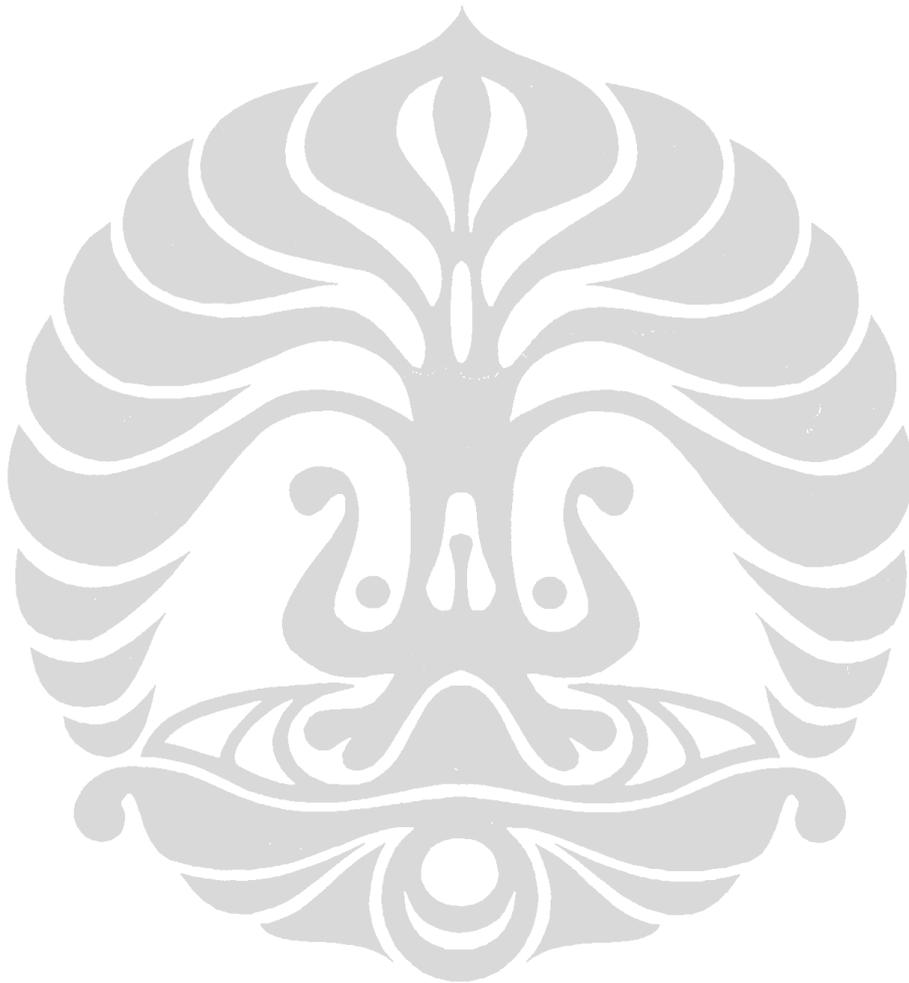


Penulisan skripsi ini diakhiri pada BAB V Penutup; berisikan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta refleksi kritis filosofis penulis terhadap kedinamisan ideologi yang terungkap melalui keragaman nilai ideologi dalam fenomena sosial. Kemudian penulis menjelaskan bagaimana relevansi dinamika ideologi dalam kehidupan sosial.



BAB 2
IDEOLOGI DALAM KEHIDUPAN SOSIAL
DI INDONESIA

Pada bab ini, penulis akan membahas bagaimana masyarakat menciptakan dan mengembangkan ideologi dalam suatu proses yang dinamis. Pada awalnya ideologi merupakan cita-cita bersama sekelompok masyarakat. Suatu cita-cita yang hanya mungkin tercapai jika terdapat kesatuan relasional antara pemaknaan, aksi dan interaksi dalam kehidupan sosial. Melalui kesatuan relasional itu, ideologi diciptakan, disebarluaskan dan diruntuhkan dalam suatu proses yang bersifat dialektis. Dalam proses ini, ideologi mengisi kehidupan sosial bersama kehendak kehendak sekelompok masyarakat untuk mencapai kekuasaan melalui kegiatan reproduksi sosial dan penetapan keteraturan sosial, sehingga ideologi tersebut mendominasi kehidupan sosial dan memicu perlawanan dari masyarakat yang terpinggirkan.

2.1. Pengertian Ideologi

Ideologi berasal dari kata bahasa Yunani *idea* (ide atau gagasan) dan *logos* (studi tentang ilmu pengetahuan). Istilah Ideologi pertama kali dikemukakan oleh Antoine Destutt de Tracy, yang hidup pada masa revolusi Perancis. Ia melihat bahwa ketika revolusi berlangsung, banyak ide atau pemikiran telah menginspirasi ribuan orang untuk menguji kekuatan ide-ide dalam lingkup pertarungan politik dan mereka rela mengorbankan hidup demi ide-ide yang diyakini tersebut. Dalam rumusan de Tracy, ideologi diharapkan menjadi cabang ilmu pengetahuan yang bertujuan mengkaji serta menemukan hukum-hukum yang melandasi pembentukan serta perkembangan ide-ide dalam masyarakat.

Ideologi adalah sekumpulan ide yang merefleksikan aspirasi sosial dari individu, kelompok, atau kelas sosial tertentu. Suatu konsep gagasan yang disepakati oleh sekelompok masyarakat dan ekspresinya dalam institusi sosial merupakan ideologi. Ideologi memiliki tendensi untuk mendominasi pemaknaan cara hidup dan cara memahami dunia di sekitar kita. Ideologi mencakup serangkaian sistem nilai atau kepercayaan dan penerapannya dalam kehidupan sosial yang dikendalikan oleh institusi sosial tertentu.

Ideologi merupakan suatu konsep pemaknaan sosial yang bersifat rasional dan juga irrasional. Sekelompok masyarakat yang meyakini suatu ideologi mewujudkan nilai-nilai tertentu untuk mencapai hakekat kebenaran menurut perspektif mereka.

Ideologi teraktualisasi melalui kegiatan sehari-hari yang dikendalikan oleh nilai-nilai tertentu dalam suatu konsensus yang sudah disepakati bersama.

'Ideology' is an indispensable term in sociological analysis, but the first level of difficulty is whether it is used to describe: (a) the formal and conscious beliefs of a class or other social group—as in the common usage of 'ideological' to indicate general principles or theoretical positions or, as so often unfavourably, dogmas; or (b) the characteristic world-view or general perspective of a class or other social group, which will include formal and conscious beliefs but also less conscious, less formulated attitudes, habits and feelings, or even unconscious assumptions, bearings and commitments. Moreover, while 'ideology' retains, from the weight of linguistic usage, the sense of organized beliefs (whether formal and conscious or pervasive and dissolved), it can often be supposed that such systems are the true origin of all cultural (and indeed other social) production.⁵

Ideologi pada dasarnya adalah kesadaran dan ketidaksadaran dari individu atau kelompok yang berkembang sesuai dengan konteks sosio-historis. Ideologi menggambarkan sebuah ekspresi sosial dan kultural konteks historis dalam keagamaan, pendidikan, politik, ekonomi, dan sebagainya. Dimensi-dimensi ideologi terdapat pada pengetahuan manusia dalam memahami bagaimana tradisi-tradisi ditransmisikan secara otoritatif dalam berbagai macam masyarakat dan bagaimana ini diperkuat dalam mitos, ritual, doktrin atau dogma, dan sebagainya. Ideologi mengikat seluruh lapisan masyarakat dalam suatu konsensus serta menetapkan pemaknaan sosial untuk mendukung kepentingan pihak-pihak yang berkuasa.

Suatu kelompok masyarakat yang meyakini suatu ideologi akan bertindak berdasarkan kesadaran ataupun ketidaksadaran kolektif, masyarakat tersebut akan membentuk suatu sistem keyakinan dalam kehidupan sosial. Sistem keyakinan yang

⁵ Raymond Williams, *The Sociology of Cultures*, Chicago: The University of Chicago Press, 1995, hlm.26-8.

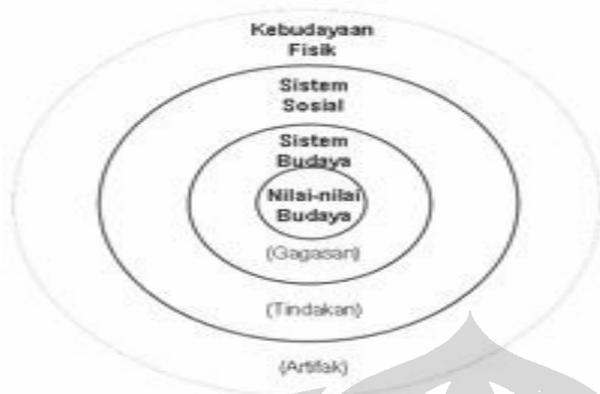
berupa pandangan umum atau perspektif general menjadi landasan terbangunnya tujuan ideologis. Tujuan ideologis hanya dapat terwujud jika masyarakat disatukan oleh pandangan umum, sehingga mereka berpikir dan bertindak secara kolektif. Oleh karena itu, ideologi membutuhkan nilai ideologis yang dapat menyatukan masyarakat dalam suatu konsensus.

2.1.a. Ideologi dan Nilai Ideologis di dalamnya

Ideologi merupakan cerminan cara berpikir masyarakat dalam suatu komunitas tertentu. Masyarakat yang meyakini suatu ideologi akan berpikir dan berkehendak berdasarkan tujuan yang sudah disepakati bersama. Ideologi tidak hanya bersifat material, melainkan juga memuat seperangkat nilai yang bersifat menyeluruh dan mendalam—yang diyakini oleh suatu masyarakat sebagai pengetahuan atau pandangan hidup mereka. Melalui nilai ideologis, mereka mengetahui bagaimana cara menjalani kehidupan yang baik, yaitu secara moral dianggap benar dalam bersikap dan bertingkah laku.

Masyarakat memiliki kecenderungan untuk beranggapan bahwa nilai ideologis mereka adalah nilai yang paling 'benar' dan segala sesuatu di luar nilai ideologis tersebut adalah 'salah'. Dengan berpikir, berkehendak dan bertindak berdasarkan nilai ideologis yang mereka yakini kebenarannya berarti mereka sudah melakukan sesuatu yang benar. Nilai ideologis merupakan alat pembenaran individu maupun kelompok saat nilai tersebut dipergunakan untuk membenarkan keyakinan, keinginan, dan tindakan mereka tanpa mempedulikan kebenaran (objektif) lain.

Koentjaraningrat menawarkan empat wujud kebudayaan, yaitu: kebudayaan sebagai nilai ideologis; kebudayaan sebagai sistem gagasan; kebudayaan sebagai sistem tingkah laku dan tindakan yang berpola; dan kebudayaan sebagai benda fisik (artifak).



Bagan 1: Nilai dan Kebudayaan

Sumber: <http://wordpress.com>, diakses pada pukul 10.05, 06-07-2009

Dalam suatu kebudayaan atau kehidupan sosial, nilai-nilai ideologis adalah tahap awal yang merupakan hasil pemikiran manusia dalam suatu kelompok sosial. Ideologi dirumuskan secara internal di antara anggota kelompok sosial. Setelah ideologi terkonsepkan, masyarakat kemudian membentuk aturan yang berupa tekstual (tertulis) maupun norma (lisan). Masyarakat yang menjalani kehidupannya dalam kelompok sosial tersebut berkewajiban untuk mentaati aturan sosial yang sudah terbentuk.

Dengan demikian, nilai ideologis membuat keterikatan psikis antara masyarakat dengan ideologi yang diyakininya, sehingga masyarakat memiliki kesetiaan terhadap ideologi mereka. Masyarakat setia pada ideologinya karena mempunyai tanggungjawab untuk menerapkan dan mengembangkan nilai ideologis mereka dalam kehidupan sosial. Masyarakat mendefinisikan nilai ideologis sebagai pedoman yang dianggap mampu mengarahkan masyarakat pada apa yang mereka yakini sebagai kebenaran. Pedoman yang terdapat dalam nilai ideologis berfungsi untuk mempertahankan bangunan pemikiran yang sudah terbentuk dalam suatu sistem sosial.

2.1.b. Ideologi Sebagai Hegemoni

Konsep hegemoni dibahas secara menyeluruh oleh Antonio Gramsci. Gramsci lahir pada tanggal 22 Januari 1891 di Ales, sardinia dan meninggal di Roma, Italia pada tanggal 27 April 1937. Pada saat fasisme bangkit, ia mengamati kegagalan pergerakan kelas pekerja Eropa Barat. Gramsci memperhatikan penghapusan determinisme

ekonomi dari Marxisme dan juga membangun kekuatan yang mempunyai tanggung jawab pada institusi superstruktural, sehingga ia berpendapat bahwa pertarungan kelas harus selalu melibatkan ide-ide. Baginya, ide-ide sangat berperan dalam menggerakkan revolusi dan juga yang mencegahnya. Pengalamannya sebagai pemimpin dari Partai Komunis Italia yang dipenjarakan oleh Pemerintah Fasisme Musolini membuatnya mengevaluasi kembali beberapa doktrin dari Moscow yang diterapkan dalam aktivitas politik komunisme. Gramsci mencari penyebab kealahannya secara ideologis dengan menganalisa sistem pengendalian yang diterapkan kapitalisme terhadap seluruh lapisan masyarakat.

Bagi Gramsci, ideologi lebih dari sekadar sistem ide. Ia berpendapat bahwa keberadaan peralatan (*instrument*) ideologi dimanfaatkan oleh kelas berkuasa untuk mengendalikan kekuasaan. Ia memisahkan antara “ideologi” sebagai kesadaran murni dan ideologi dalam kesejarahan yang dipergunakan oleh struktur sosial tertentu untuk mengatur cara berpikir dan berkehendak masyarakat yang hidup di dalamnya. Ideologi sebagai sistem yang berubah-ubah (*arbitrary systems*) dikemukakan oleh para intelektual berbeda dengan ideologi yang bersifat historis (*historically organic ideologies*), yaitu ideologi yang diperlukan dalam kondisi sosial tertentu.

Hegemoni merupakan sesuatu yang disesuaikan dan dinegosiasikan secara berkelanjutan. Pada kenyatannya, selama fase post-revolusioner (saat kelas buruh memegang kendali), fungsi hegemoni tidaklah menghilang, melainkan berubah bentuk. Oleh karena itu, pandangan umum (*common sense*) bukan merupakan sesuatu yang kaku dan tidak bergerak, tetapi secara terus menerus melakukan perubahan pada dirinya. Gramsci menyatakan bahwa kelas yang berkuasa menggunakan dua cara umum dalam melakukan kontrol sosial:

1. *Coersive Control*: Dimanifestasikan melalui paksaan langsung atau ancaman.
2. *Consensual Control*: Kendali saat individu secara sukarela menerima perspektif dari kelas dominan.

Cara untuk menumbangkan hegemoni yang dominan, tidak hanya berupa kekerasan saja, namun juga berupa aktivitas politik. Gramsci mengusulkan dua bentuk strategi politik dalam mencapai garis besar dari hegemoni yang berkuasa dan pembentukan masyarakat sosialis:

1. *War of Manoeuvre*: Perlawanan dengan serangan yang frontal (*frontal attack*), bertujuan untuk meraih kemenangan secara cepat, dan khususnya ditujukan kepada masyarakat dengan kekuasaan negara yang dominan dan terpusat serta gagal dalam membangun hegemoni yang kuat dalam *civil society*.
2. *War of Position*: Perlawanan yang dilakukan melalui perjuangan yang panjang; pertama menyangkut institusi dari suatu *civil society*; kedua kaum sosialis mengambil kendali melalui perjuangan kultural dan ideologis dibandingkan persaingan ekonomi dan politik, ditujukan khususnya untuk masyarakat liberal-demokratis dengan kekuatan negara yang lemah, namun hegemoni yang lebih kuat.

Gramsci mendefinisikan hegemoni sebagai dominasi satu kelompok atau kelas dalam masyarakat yang dicapai tidak melalui kekuatan (*force*) tapi melalui konsensus (*consent*) dengan kelompok atau kelas yang lain. Dengan kata lain, hegemoni adalah suatu proses dalam kehidupan sosial saat fraksi dari kelas yang dominan melakukan kontrol melalui kepemimpinan moral dan intelektual terhadap kelas atau kelompok masyarakat lain. Kelompok yang berada pada posisi dominan tersebut memiliki kekuasaan dan kemampuan untuk mengartikulasikan kepentingan mereka terhadap kelompok lain di bawahnya. Mereka tidak memaksakan ideologinya terhadap kelas atau kelompok yang lain, tetapi lebih pada merepresentasikan suatu proses transformatif secara politik dengan menerapkan prinsip hegemoni yang menyatukan kelompok dominan, menengah, dan subordinat dalam suatu kepentingan bersama.

Hegemonisasi adalah suatu proses yang menunjukkan bahwa suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas di bawahnya dengan cara persuasif. Hegemoni bukanlah hubungan dominasi yang menggunakan kekerasan melainkan hubungan dengan persetujuan melalui kepemimpinan politik dan penyebaran nilai ideologis. Dalam suatu hegemoni, legitimasi kekuasaan kelompok dominan tidak ditentang oleh kelompok subordinat karena seluruh kebudayaan, wacana sosial dan politiknya sudah dipersuasikan dalam pemaknaan sosial yang mendukung kekuasaan pihak berkuasa.

Menurut Gramsci, konsep hegemoni terjadi ketika kelompok masyarakat subordinat tereksplorasi dan secara sukarela bersedia menjadi bagian dari struktur sosial yang dikuasai oleh masyarakat dominan. Hegemoni mengacu kepada suatu situasi yang mengkondisikan kelompok yang berkuasa menjadi pemenang. Situasi tersebut didukung oleh persuasi sistem nilai dan pemaknaan dari kelompok yang berkuasa. Menurut Gramsci, suprastruktur tidak hanya refleksi dari struktur, melainkan justru menegaskan bahwa suprastruktur adalah sebuah realitas, objektif, dan operatif.

2.1.c. Counter Hegemoni

Gramsci mengutamakan *consensual basic of civil society* dibandingkan *coercive basic of political society*, sehingga selain sebagai sarana kelompok berkuasa (*dominant*) untuk mengatur konsensus dan hegemoni, *civil society* juga dapat dipahami sebagai sarana di mana kelompok-kelompok sosial yang lebih rendah (*subordinat*) dapat menyusun perlawanan mereka dan membangun sebuah hegemoni alternatif-hegemoni tandingan (*counter-hegemony*).

Sebagai seorang neo-Gramscian, Raymond William mengklasifikasikan dua cara kerja hegemoni, yaitu ideologi dan budaya. Melalui hegemoni, ideologi kelompok dominan dapat di distribusikan dan nilai kepercayaan dapat ditularkan. Ideologi yang menghegemoni menyatu dan tersebar dalam praktik kehidupan, persepsi dan pandangan sebagai sesuatu yang dilakukan dan dihayati secara sukarela. Jika hegemoni adalah budaya, maka secara material ia adalah produk dari agen yang sadar dan bisa dilawan oleh alternatif sebuah aksi *counter-hegemony*. Jika hegemoni adalah struktur ideologi maka, ia akan menentukan subjektivitas dari subjek dengan cara-cara yang secara radikal mengurangi kemungkinan sebuah tindakan *counter-hegemony*.

Dalam perspektif posmodern, Derrida mengajukan suatu konsep yang prinsipnya sama dengan *counter-hegemony*, yaitu Dekonstruksi. Dekonstruksi menurut Derrida adalah metode yang berusaha meruntuhkan kemungkinan kehadiran makna tunggal dalam teks maupun wacana. Dekonstruksi berhubungan dengan konsep *difference* yang merujuk kemungkinan tanpa batas untuk bermain dengan makna-makna yang berbeda sehingga interpretasi absolut atas suatu teks maupun wacana tidak dimungkinkan. Sebagaimana Derrida, Rorty mengklaim bahwa kita seharusnya mencoba suatu niali

yang bermanfaat dalam kehidupan sosial. Segala sesuatu yang membuat perdebatan dan konflik seharusnya diminimalisir melalui proses edifikasi (*edification*), sehingga tidak ada kebenaran yang pasti secara fundamental. Keduanya menolak nilai-nilai yang bersifat fondasional karena realitas sosial dipenuhi oleh kepluralitasan dan kemungkinan.

Suatu ideologi berkembang dalam kehidupan sosial ketika ide tertentu berfungsi sebagai kepentingan tertanam (*vested interest*) di dalam masyarakat. Konsep pemikiran berupa nilai ideologis mampu mencakup kolektivitas manusia yang jauh lebih besar. Ideologi membenarkan apa yang diciptakan oleh sekelompok mereka yang kepentingannya dilayani; dan ideologi menafsirkan realitas sosial sedemikian rupa sehingga pembenaran dibuat rasional atau masuk akal.

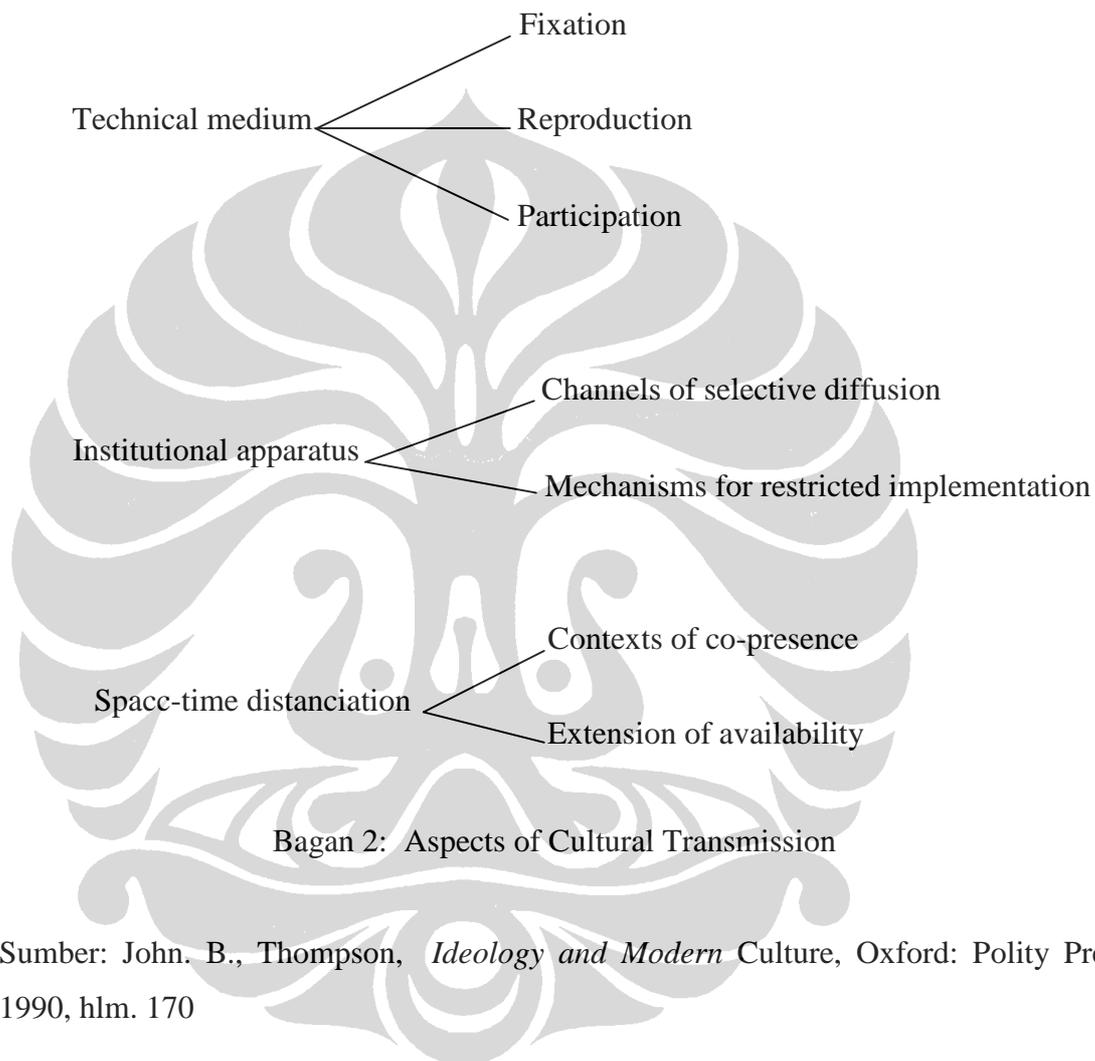
2.2. Proses Dialektis dalam Ideologi

Ideologi dalam kehidupan sosial terus-menerus mengalami perubahan. Perubahan pada ideologi terjadi dalam suatu proses yang berkelanjutan. Proses yang berkelanjutan merupakan kondisi yang dibutuhkan bagi sosialisasi ide atau gagasan yang terkandung dalam ideologi agar bisa diterima oleh masyarakat. Ideologi terdiri atas proses pemaknaan, aksi dan interaksi individu berlangsung secara terus-menerus dalam suatu relasi sosial. Melalui relasi sosial, suatu ideologi terbentuk, tersebarluaskan, dan tergantikan oleh ideologi lain. Hubungan antara ideologi dan kehidupan sosial terjalin dalam suatu dialektika. Dialektis dalam pengertian bahwa ideologi berawal dari hal yang sederhana menuju ke hal yang lebih kompleks.

Konsep dialektika pertama kali dikemukakan oleh Fichte dan kemudian dipopulerkan oleh Hegel. Teori dialektika menjelaskan bagaimana proses perpindahan dari Tesis, Antitesis, menuju ke Sintesis. Kemudian teori ini dikembangkan oleh Marx dan Engels dalam konsep materialisme dialektis. Dalam konsep tersebut, proses dialektis harus dilihat secara materialis karena terjadi di tengah kehidupan sosial. Perubahan menuju sintesis dilakukan melalui pertentangan kelas.

Ideologi sudah ada sejak awal peradaban manusia dan terus berubah secara dialektis hingga saat ini. Dalam dialektika terjadi pertentangan antara tesis dan antitesis yang pada akhirnya membentuk sintesis. Sintesis adalah kesempurnaan yang dicapai

melalui perlawanan tesis dan antitesis. Setelah sintesis terwujud maka proses dialektika dimulai dari awal lagi. Dialektika adalah perubahan yang dipicu oleh sifat kritis terhadap ketidaksempurnaan suatu gagasan dan berusaha menggantinya dengan sesuatu yang baru.



Sumber: John. B., Thompson, *Ideology and Modern Culture*, Oxford: Polity Press, 1990, hlm. 170

Proses dialektis dari suatu ideologi yang berkuasa di tengah kehidupan sosial tertentu melibatkan beberapa aspek di dalamnya, seperti pencapaian kekuasaan, reproduksi dan keteraturan sosial, serta perlawanan dari masyarakat terpinggirkan terhadap ideologi yang sedang berkuasa. Sekelompok individu yang meyakini suatu ideologi selalu menghendaki agar ideologi mereka bisa berkembang semaksimal mungkin, dan hal tersebut dapat terjadi jika mereka memiliki kekuasaan. Saat kekuasaan sudah dimiliki, maka untuk mempertahankan kekuasaan yang ada diperlukan

reproduksi dan keteraturan sosial. Reproduksi dan keteraturan sosial menciptakan kesadaran komunal. Kenyataan tersebut memungkinkan ideologi untuk melakukan hegemonisasi dalam kehidupan sosial. Dalam dominasi ideologi ini, individu pada umumnya sulit keluar dari identitas sosial yang sudah terbentuk. Oleh karena itu, dibutuhkan pemikiran filosofis untuk melakukan perlawanan terhadap dominasi ideologi dengan mendekonstruksi atau mengedifikasinya.

2.2.a. Pencapaian Kekuasaan

Masyarakat pada dasarnya mempunyai tujuan ideal tertentu yang terkonsepkan dalam suatu ideologi. Tujuan tersebut akan terwujud jika masyarakat memiliki kekuasaan untuk menerapkan ideologi mereka. Kekuasaan adalah medium yang diperlukan oleh ideologi untuk menyebarluaskan gagasan yang terdapat didalamnya. Penyebaran gagasan tersebut biasanya dilakukan melalui persuasi, yaitu suatu pendekatan untuk meyakinkan masyarakat atas apa yang ingin disampaikan. Melalui persuasi, gagasan diterima dan berkembang hingga menguasai ruang publik secara disadari atau tidak oleh individu yang mendiami kebudayaan setempat.

Melalui berbagai kegiatan yang terdapat dalam kehidupan sosial, ketiga elemen yang menentukan terbentuknya suatu struktur tersebut saling berhubungan. Elemen signifikansi mempengaruhi bagaimana elemen dominasi dan legitimasi dari struktur kekuasaan diterapkan dalam kehidupan sosial. Signifikansi terwujud dalam sistem penandaan yang berupa simbol tertentu. Simbol-simbol yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari mengandung suatu makna yang mengarahkan masyarakat untuk bertindak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pihak yang sedang berkuasa. Salah satu bagian dari sistem penandaan yang selalu ada dalam setiap interaksi di kehidupan sosial adalah bahasa.

Setiap nilai ideologis memiliki makna tertentu yang mempengaruhi individu untuk berpikir, berbicara dan bertindak berdasarkan tujuan yang sudah ditetapkan. Bahasa dengan makna yang hanya menguntungkan pemegang kekuasaan akan dianggap sebagai sesuatu yang normal oleh masyarakat karena digunakan terus-menerus dalam keseharian. Masyarakat yang terbiasa menggunakan nilai ideologis itu, kesadarannya akan memaknai segala sesuatu selaras dengan makna yang terdapat dalam nilai ideologis tersebut. Penggunaan suatu nilai ideologis merupakan pengeskpresian diri secara individual dalam aturan yang berlaku secara umum.

Foucault menyatakan dalam *The Subject and Power*, bahwa relasi kuasa dapat tercipta karena terdapat beberapa aspek di kehidupan sosial yang mendukungnya; (1) Sistem Diferensiasi; Diferensiasi atau pembedaan dalam kehidupan sosial memungkinkan seseorang individu untuk melakukan suatu tindakan terhadap individu lainnya. Pembedaan terdeterminasi oleh hukum atau tradisi dari status atau keistimewaan; perbedaan ekonomi dalam pengutamaan kekayaan dan kemewahan, peralihan dalam proses produksi, perbedaan linguistik dan kebudayaan, perbedaan dalam pengetahuan dan kompetensi, dan sebagainya. Setiap relasi kuasa memiliki operasi diferensiasi yang menjadi kondisi dan hasil dari kekuasaan pada saat yang sama. (2) Tipe Obyektif; Tipe obyektif dikehendaki oleh mereka yang bertindak mewakili masyarakat. Pengobyektifan di kehidupan sosial terdapat pada pengendalian keistimewaan, akumulasi keuntungan, pengoperasian otoritas berdasarkan status dan sebagainya. (3) Tujuan diterapkannya relasi kuasa terhadap masyarakat; Relasi kuasa diterapkan karena suatu tujuan tertentu yang mempengaruhi masyarakat untuk bertindak sesuai dengan tujuan tersebut. Perealisisian dari tujuan itu bisa berupa perlakuan langsung dari penguasa, dampak dari disparitas ekonomi, kompleks atau tiadanya pengontrolan, aturan tidak langsung atau yang sudah termodifikasi, dengan atau tanpa teknologi, tujuan menetapkan kesemua hal di atas kedalam tindakan. (4) Bentuk dari institusionalisasi; Institusionalisasi merupakan gabungan antara cara pandang tradisional, struktur legal dan fenomena dalam kehidupan sosial. Bentuk ini bisa ditemukan pada pemerintahan yang tertutup, dengan regulasi yang diterapkan, struktur hierarkhial, sebuah otonomi yang fungsinya relatif.⁶

Masyarakat sebagai realitas obyektif menyiratkan pelembagaan di dalamnya. Proses pelembagaan (institusionalisasi) diawali oleh eksternalisasi yang dilakukan berulang-ulang, sehingga terlihat polanya dan dipahami bersama dan kemudian menghasilkan pembiasaan. Kebiasaan yang telah berlangsung memunculkan pengendapan dan tradisi. Pengendapan dan tradisi ini kemudian diwariskan ke generasi sesudahnya melalui bahasa. Disinilah terdapat peranan di dalam tatanan kelembagaan, termasuk dalam kaitannya dengan pentradisian pengalaman dan pewarisan pengalaman

⁶ Michael Foucault, *The Subject and Power*, dipublikasikan kembali dalam "Critical Inquiry 8", (Summer 1982): 777-795.

tersebut. Oleh karena itu, peranan sosial mempresentasikan tatanan kelembagaan atau lebih jelasnya; pelaksanaan peranan sosial adalah representasi diri manusia sebagai subyek. Peranan sosial menampilkan suatu keseluruhan rangkaian perilaku yang melembaga. Selain itu, masyarakat sebagai realitas obyektif juga menyiratkan keterlibatan legitimasi. Legitimasi berfungsi untuk membuat obyektivasi makna yang sudah melembaga menjadi rasional dan diterima secara subyektif oleh seluruh anggota masyarakat.

2.2.b. Reproduksi dan Keteraturan Sosial

Sebagaimana yang terdapat pada pembahasan sebelumnya, bahwa ideologi bertendensi untuk menghegemoni kekuasaan. Hegemonisasi kekuasaan dalam kehidupan sosial-budaya terdapat pada aktivitas reproduksi sosial. Ideologi merupakan sebuah sistem yang terbentuk dalam suatu pola dengan serangkaian pemaknaan dan kekuasaan yang saling berelasi. Pemaknaan yang berkembang di tengah masyarakat adalah pemaknaan yang melayani relasi kuasa. Kondisi sosial mengkontruksi pemaknaan yang diciptakan, disebarluaskan, dan diterima bersama secara individual. Dalam kehidupan sosial-budaya, pemaknaan tersebut terwujud dalam bentuk simbolik, seperti benda-benda yang sering digunakan oleh masyarakat, bahasa keseharian, bacaan tertulis, cara berpakaian, kebiasaan sehari-hari, dan sebagainya. Proses pemaknaan bergerak melalui bentuk simbolik dalam rangka melayani suatu relasi dominasi tertentu.

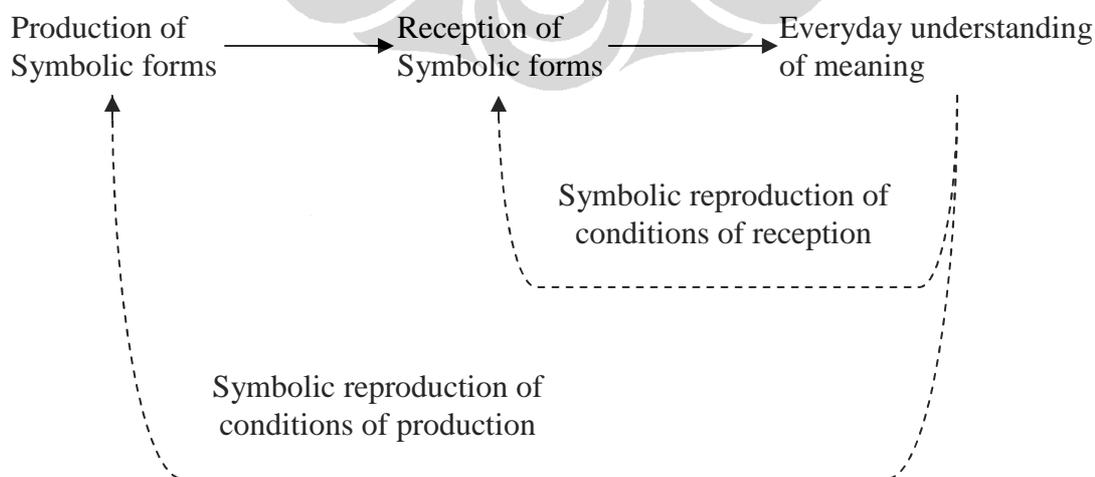


Figure 3.2. The Symbolic Reproduction of Social Contexts

Bagan 3

Sumber: John. B., Thompson, *Ideology and Modern Culture*, Oxford: Polity Press, 1990, hlm. 154

Pemaknaan yang terkait dalam sebuah sistem mengintegrasikan pikiran, aksi, interaksi, sosial. Melalui pemaknaan yang bersifat general, masyarakat menetapkan suatu norma yang disepakati bersama. Norma tersebut menjadi acuan yang mengarahkan masyarakat agar melakukan tindakan yang dianggap benar dan baik. Acuan yang sudah terbentuk berfungsi untuk menjaga supaya relasi kuasa tetap dalam keadaan stabil.

Aspek nilai dan kepercayaan merupakan hal yang sangat signifikan karena mengandung elemen dominatif yang sangat dibutuhkan oleh ideologi. Nilai dan kepercayaan berfungsi sebagai perekat simbolik yang mempersuasi individu untuk tetap melakukan perannya dalam tatanan sosial yang sudah terbentuk. Tanpa nilai dan kepercayaan, perencanaan yang terdapat dalam ideologi tidak akan terealisasikan. Sebaliknya jika kepercayaan terhadap suatu nilai sudah tertanam dalam kesadaran masyarakat, maka masyarakat yang hidup di dalamnya akan mengikuti aturan yang telah terkonsepkan dalam ideologi tersebut. Nilai dan kepercayaan memungkinkan terjalannya relasi sosial yang memproduksi kembali gagasan dari suatu ideologi secara berkelanjutan.

Nilai dan kepercayaan sebagai perekat simbolik memberikan kondisi yang potensial bagi proses reproduksi sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, ideologi bukanlah konsensus antar individu yang plural dengan beragam nilai dan kepercayaan, melainkan konsensus antar suatu nilai dan kepercayaan dengan individu yang merasa berkewajiban untuk menghormatinya dan menerapkannya dalam kehidupan nyata. Peranan individu berdasarkan suatu nilai dan kepercayaan di kehidupan sosial adalah reproduksi sosial terhadap suatu ideologi. Dengan demikian, reproduksi sosial terjadi melalui rutinitas yang dijalani individu dan didasari oleh nilai dan kepercayaan tertentu.

Pencapaian kekuasaan dari suatu ideologi, tidak hanya didukung oleh kegiatan reproduksi sosial, melainkan juga keberaturan sosial. Dalam menjaga kestabilan kekuasaan suatu ideologi, masyarakat yang berada pada posisi dominan membentuk keteraturan sosial. Relasi kuasa dapat berjalan secara terkendali melalui keteraturan. Keteraturan menata sistem pemaknaan aksi dan interaksi sosial. Keteraturan sangat penting dalam ideologi karena manusia terus-menerus berubah seiring dengan perubahan ruang dan waktu. Perubahan dalam diri manusia dapat berupa perubahan kehendak, selera, tujuan, kepentingan dan sebagainya. Perubahan seringkali membuat masyarakat tidak lagi sejalan dengan ideologi yang ada. Berubahnya masyarakat sebagai aktor sosial yang memiliki peran signifikan dalam kehidupan sosial, tentunya akan berdampak pada perubahan struktur sosial.

Keteraturan sosial meningkatkan kepastian dalam proses pencapaian tujuan dari suatu ideologi. Sistem sosial cenderung menghindari ketidakpastian karena tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Sehingga keteraturan merupakan sarana untuk mengatasi kecemasan atau ketidakpastian yang mungkin terjadi dalam kehidupan sosial. Keteraturan memberikan gambaran yang lebih jelas dari kemungkinan yang dituju oleh suatu ideologi. Masyarakat menjadi lebih terarah untuk melakukan hal-hal yang dibutuhkan dalam rangka mengendalikan keadaan sosial melalui keteraturan.

2.2.c. Perlawanan Terhadap Ideologi Berkuasa

Kehidupan sosial merupakan serangkaian realitas yang berelasi satu sama lain. Dalam perubahan sosial suatu ideologi diproduksi, diterima, direproduksi, dan diruntuhkan. Gagasan yang terdapat pada ideologi diproduksi berdasarkan kepentingan yang sama. Suatu ideologi akan terus berkembang dan bertahan pada lingkup sosial yang ditinggali oleh sekelompok masyarakat yang memiliki tujuan kolektif bersama. Namun sebaliknya, suatu ideologi akan dikritik, ditolak dan bahkan diruntuhkan oleh masyarakat yang tidak memiliki kecocokan dengan gagasan yang terdapat dalam ideologi tersebut.

Meskipun ideologi selalu berupaya untuk menyebarluaskan pengaruhnya melalui persuasi, pemaksaan, sanksi dan sebagainya, tetapi akan selalu ada pihak-pihak

yang terasingkan dari cakupannya. Keterasingan masyarakat yang berada pada posisi bawah (subordinat) disebabkan oleh perbedaan terhadap keberadaan mereka dari masyarakat yang berada pada posisi dominan. Dalam hal ini, masyarakat di posisi dominan cenderung mendiskriminasi masyarakat yang menempati posisi subordinat. Perlakuan yang berbeda dalam relasi sosial tersebut lambat laun akan menyebabkan terbentuknya kesenjangan. Kesenjangan yang berlangsung dalam waktu lama mendorong masyarakat yang berada pada posisi subordinat untuk melakukan perlawanan terhadap sistem kekuasaan yang sedang berlangsung.

Dalam setiap manusia terdapat kesadaran individual yang pada dasarnya sejalan dengan kesadaran kritis. Kesadaran tersebut merupakan bagian dari reaksi manusia terhadap aspek sosial yang dijumpai dan dialaminya. Kesadaran kritis dalam diri individu akan dinyatakan jika dirinya berada dalam keadaan tertekan. Individu yang merasa tertekan cenderung untuk mengekspresikan perasaannya sebagai upaya untuk mendapatkan kebebasan dan haknya. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang bebas, namun kebebasan menjadi beragam saat manusia berperan sebagai makhluk sosial.

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa dominasi suatu ideologi memicu perlawanan dari masyarakat yang tertekan keberadaannya (terepresi) oleh sistem kekuasaan yang ada, namun masyarakat tersebut kerap kali mendapatkan kesulitan dalam melakukan perlawanan. Penyebab dari kesulitan untuk melawan adalah karena ideologi sudah menghegemoni kehidupan sosial. Ideologi menguasai sistem pemaknaan yang mengatur aksi dan interaksi sosial dalam kegiatan sehari-hari, sehingga masyarakat merasa nyaman dengan kondisi dirinya dalam situasi sosial yang ada dan tidak menyadari bahwa mereka harus melakukan perlawanan. Dalam hal ini, setiap lapisan masyarakat melaksanakan perannya masing-masing berdasarkan posisinya sistem sosial untuk melanjutkan relasi kuasa yang sudah terbentuk. Masyarakat merupakan bagian dari ideologi yang sedang berkuasa.



BAB 3

NILAI IDEOLOGIS DAN KERAGAMANNYA

Pada bab ini, penulis akan membahas tentang nilai ideologis sebagai bagian dari kehidupan sosial. Nilai ideologis senantiasa mempengaruhi kesadaran dan kehendak masyarakat dalam suatu struktur sosial. Kehidupan sosial pada dasarnya heterogen, sehingga nilai ideologis yang berada di dalamnya juga bersifat heterogen. Keragaman nilai ideologis tidak terlepas dari keragaman aspek-aspek yang menentukan bagaimana suatu nilai ideologis diciptakan, disebarluaskan, dan diterima. Aspek -aspek yang mempengaruhi keragaman nilai ideologis, antara lain karakter manusia, ruang dan waktu, institusi, serta norma sosial. Keempat aspek tersebut merupakan bagian yang

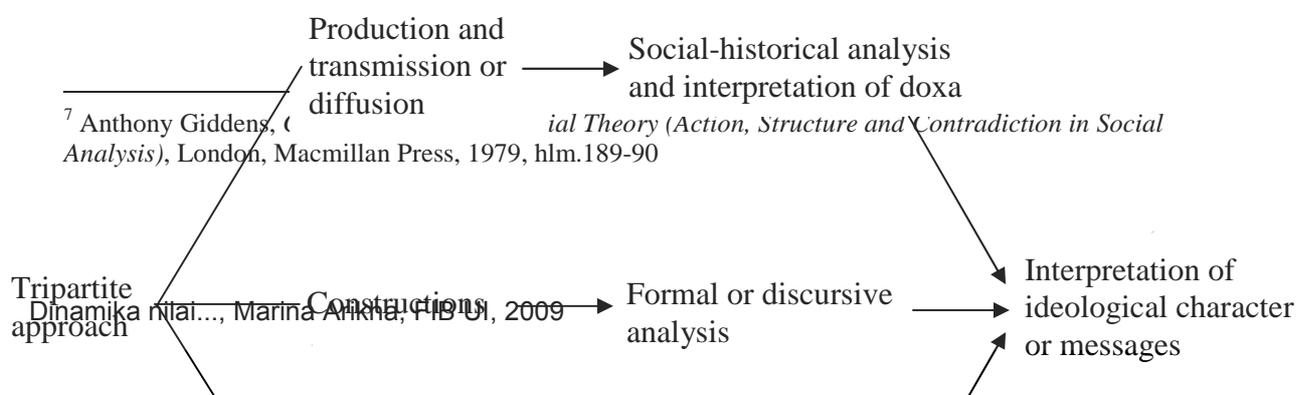
integral dari suatu sistem sosial. Keragaman aspek-aspek itu, secara langsung maupun tidak, akan menyebabkan keragaman struktur sosial.

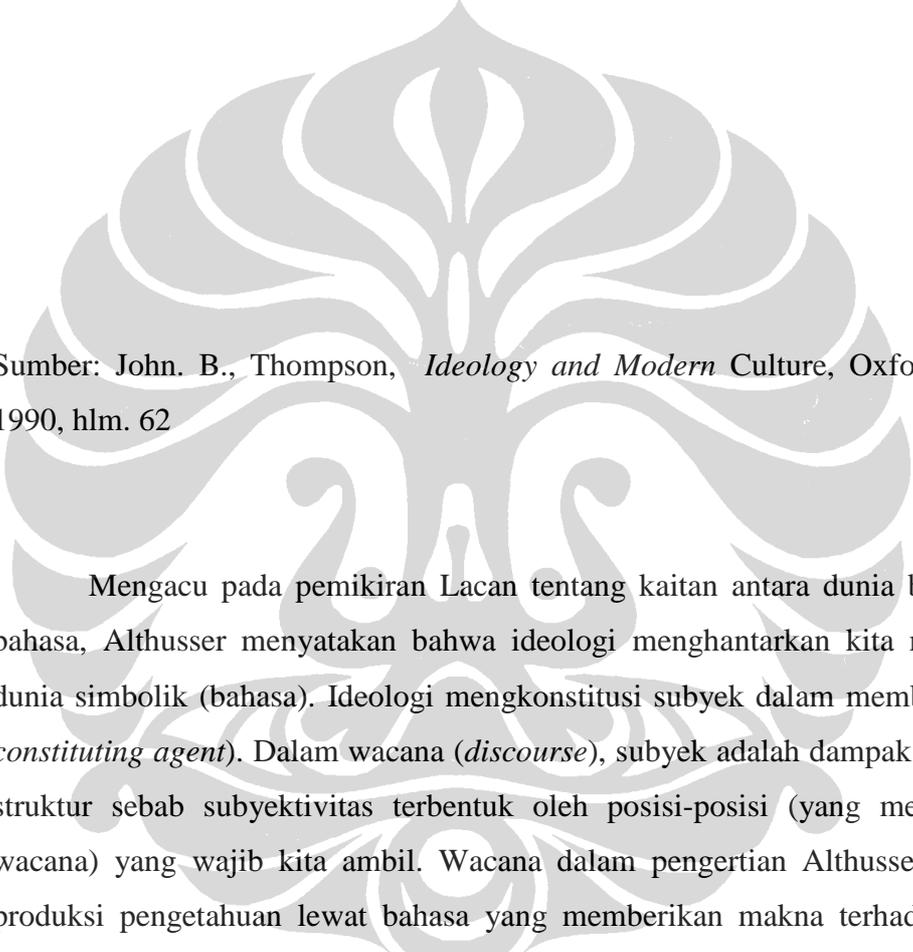
3.1 Nilai Ideologis Dalam Kehidupan Sosial

Kehidupan sosial merupakan kehidupan bersama berdasarkan konsensus. Suatu konsensus tersepakati karena sekelompok individu memiliki ketertarikan (*interest*) yang sama. Ketertarikan sosial pada umumnya terkonsepkan ke dalam suatu nilai tertentu yang disebut sebagai nilai ideologis. Nilai ideologis mempengaruhi individu dalam berpikir, berkehendak, dan bertindak.

Interests imply potential courses of action, in contingent social and material circumstances. A person shares certain interests in common with others (given also the presumption of common wants). For there is one sectional interest, or 'arena of sectional interest', of dominant groups which is peculiarly universal: an interest in maintaining the existing order of domination, or major features of it, since such an order of domination ipso facto involves an asymmetrical distribution of resources that can be drawn upon to satisfy wants.⁷

Masyarakat menerapkan nilai ideologis dalam kehidupan sosial untuk mengakomodasi kepentingan mereka demi mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, masyarakat menciptakan sekaligus mentaati suatu nilai ideologis yang mereka yakini. Nilai ideologis mempengaruhi perubahan identitas, kesadaran, dan kehendak yang bersifat individual menjadi identitas, kesadaran, dan kehendak sosial. Interaksi yang terjadi dalam kehidupan sosial merupakan interaksi yang terinstitusionalisasikan atau melembaga dan dikendalikan oleh nilai ideologis. Nilai ideologis mengorganisir situasi dan kondisi sosial agar relasi kuasa tetap berjalan. Kestabilan relasi kuasa memungkinkan pihak-pihak tertentu mempertahankan dan mengembangkan ideologi mereka.





Sumber: John. B., Thompson, *Ideology and Modern Culture*, Oxford: Polity Press, 1990, hlm. 62

Mengacu pada pemikiran Lacan tentang kaitan antara dunia bawah sadar dan bahasa, Althusser menyatakan bahwa ideologi menghantarkan kita masuk ke dalam dunia simbolik (bahasa). Ideologi mengkonstitusi subyek dalam membentuk diri (*self-constituting agent*). Dalam wacana (*discourse*), subyek adalah dampak dari wacana dan struktur sebab subyektivitas terbentuk oleh posisi-posisi (yang merupakan produk wacana) yang wajib kita ambil. Wacana dalam pengertian Althusser mengacu pada produksi pengetahuan lewat bahasa yang memberikan makna terhadap obyek-obyek material dan praktik-praktik sosial. Wacana mengkonstruksi, mendefinisikan, dan memproduksi pengetahuan dengan cara yang masuk akal (*intelligible*).⁸

Nilai ideologis dikonstruksi oleh dan untuk masyarakat yang berada pada posisi dominan, tetapi diterima oleh semua lapisan masyarakat karena makna yang terdapat di dalamnya sudah ternaturalisasikan atau terasionalisasikan. Masyarakat menerima begitu saja (*taken for granted*) sebagai pedoman dalam menilai sesuatu bermakna atau tidak, padahal pemaknaan yang berkembang di kehidupan sosial merupakan pemaknaan

⁸ Mudji Sutrisno, *Ibid.*, hlm. 18-9.

sempit yang mengutamakan kepentingan masyarakat dominan. Dalam hal ini, masyarakat subordinat berada di tengah paradigma sosial yang dikuasai oleh masyarakat dominan.

Nilai ideologis memungkinkan proses transmisi dari ide ke dalam suatu realitas sosial. Nilai ideologis merupakan instrumen yang berfungsi untuk menyebarluaskan cakupan ideologi. Melalui interaksi antar individu dalam kehidupan bermasyarakat, nilai ideologis terus-menerus tersebarluaskan. Nilai ideologi yang diterima oleh masyarakat setempat kemudian akan membentuk suatu sistem pemaknaan. Pemaknaan secara universal menjadikan interaksi masyarakat tidak lagi sebagai interaksi alamiah, melainkan interaksi yang terinstitusionalisasikan atau interaksi yang bersifat melembaga. Proses pemaknaan membangun pola-pola tertentu yang mendukung kelangsungan suatu ideologi. Dengan adanya pola tersebut, masyarakat memaknai teks, subyek dan peristiwa yang terdapat dalam kehidupan sosial berdasarkan pemaknaan sosial yang sesuai dengan nilai ideologis dari masyarakat tersebut. Pemaknaan sosial dari suatu ideologi tersebarluaskan melalui fakta simbolik berupa kebendaan, tulisan dan tindakan manusia.

Nilai ideologis sebagai bagian dari relasi sosial memang mampu mempengaruhi terbentuknya identitas, kesadaran, dan kehendak sosial, akan tetapi karakter manusia, ruang dan waktu, institusi sosial, serta norma sosial sangat heterogen dan terus mengalami perubahan. Keheterogenan tersebut tidak mungkin terakomodasi dalam satu nilai ideologis. Oleh karena itu, kenyataan ini memunculkan keragaman nilai ideologis dalam kehidupan sosial.

3.1.a. Ide Tentang Identitas Sosial

Identitas pada umumnya dipahami sebagai gambaran diri seorang individu, identitas merupakan sesuatu yang identik dengan kepribadian seseorang. Kepribadian yang terdapat di dalam diri individu berasal dari kesadaran individual dan pengaruh dari lingkungan sekitar yang didapatkannya melalui interaksi sosial. Manusia tidak hanya hidup sebagai makhluk individual yang mengembangkan konsep kediriannya atas dasar pengekspresian keinginan idealnya yang berada dalam kesadarannya secara bebas,

melainkan juga makhluk sosial yang identitasnya terbangun atas dasar norma yang mengikatnya dalam suatu kewajiban bersama.

Dalam studi kebudayaan, identitas adalah produk budaya yang sepenuhnya bersifat sosial dan kultural. Identitas adalah suatu 'entitas' yang dapat diubah-ubah menurut sejarah, waktu dan ruang tertentu. Tidak ada 'yang tetap' (*esensi*) dalam entitas tersebut. Semuanya dapat 'dibuat' dan 'dibuat lagi'. Foucault mengatakan bahwa konsep 'Aku' (*I*) bukan merupakan representasi 'esensi' yang tetap, tetapi merupakan hasil sebuah diskursus. 'Aku' hanya dapat dipahami dalam keterkaitannya dengan bahasa. Sedangkan Giddens memahami identitas sebagai proyek diri (*self identity as a project*) karena tercipta melalui kemampuan mempertahankan narasi diri. Individu menyusun lintasan biografi diri dari masa lalu ke masa depan yang telah diantisipasi. Kedirian manusia dapat berubah-ubah dari lingkungan satu ke lingkungan lain dalam perentangan ruang dan waktu.⁹

Identitas individual pada dasarnya tidak terlepas dari relasi sosial dalam suatu sistem sosial. Interaksi yang antara individu dan masyarakat dalam relasi sosial mengubah identitas individual menjadi identitas sosial. Perubahan identitas terjadi karena individu dalam pemaknaan dan aturan sosial yang terberikan oleh sistem sosial. Identitas sosial terdeterminasi dan dipertahankan secara sosial melalui pencitraan sosial. Misalnya seseorang bisa dikatakan cantik atau jelek, kulit putih atau kulit hitam, nasionalis atau teroris, dan sebagainya jika individu lain dalam konteks sosial tertentu mengakui identitasnya. Kedirian individu yang diidentifikasi secara sosial merupakan identitas sosialnya. Dengan demikian, identitas sosial terbentuk karena individu menjalani kehidupannya dalam lingkungan sosial.

3.1.b. Terbentuknya Kesadaran Komunal

Manusia mengisi kehidupan sosial dengan berbagai aktivitas, konsep, simbol, dan lain-lain karena pada dasarnya manusia memiliki kesadaran. Melalui kesadaran, manusia memahami dirinya dan realitas di luar dirinya. Kesadaran merupakan potensi yang memungkinkan manusia untuk memikirkan, menginginkan, merasakan dan merumuskan segala sesuatu. Manusia menjadi makhluk individual sekaligus makhluk

⁹ Mudji Sutrisno, *Op. Cit.*, hlm. 117.

sosial karena memiliki kesadaran. Manusia memiliki sejumlah kepercayaan yang diminta di dalam ideologi-ideologi *status quo*. Seseorang tidak dapat menangkap dunia politik sepenuhnya kecuali bilamana dia memahaminya sebagai *a confidence game*, suatu permainan dengan kepercayaan, atau memahami sistem stratifikasi.

Kesadaran memang bersifat individual sebab dimiliki oleh setiap individu, namun isi yang terdapat di dalamnya tidak selalu bersifat individual melainkan komunal. Dalam kehidupan sosial, kesadaran individu mendapat banyak pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Individu berinteraksi dengan individu lain dan membentuk suatu relasi sosial yang saling berkesinambungan. Terjalannya relasi sosial menyebabkan kesadaran individual terisi oleh berbagai macam informasi, pengetahuan, pengalaman, dan bahkan nilai-nilai tertentu. Kesadaran komunal mengalami perubahan seiring dengan perubahan konteks sosial dan budaya.

Nilai ideologis di kehidupan sosial terwujud dalam bentuk kepercayaan, prinsip moral, norma susila, dan sebagainya. Beberapa hal tersebut mengkondisikan terbentuknya kesadaran komunal dalam diri manusia. Kesadaran komunal yang dipengaruhi oleh nilai ideologis kemudian mendorong individu untuk memaknai segala sesuatu secara seragam. Dalam kehidupan sosial, kesadaran manusia lebih cenderung pada kesadaran komunal daripada kesadaran individual. Kondisi sosial dipengaruhi oleh seperangkat aspek, seperti cara pandang, sistem kebahasaan dan paradigma kebudayaan. Manusia sebagai makhluk sosial menjadi bagian dalam kehidupan sosial dan kesadarannya pun ditentukan oleh kondisi sosial dimana ia tinggal. Individu mengambil pandangan dunianya secara sosial atas cara yang persis sama dengan dia mengambil peran dan identitasnya.

3.1.c. Penyeragaman Kehendak

Nilai ideologis yang terkandung dalam aturan-aturan sosial selain mempengaruhi terbentuknya kesadaran komunal, juga mengarahkan masyarakat dalam berperilaku atau bertindak. Aturan sosial memberikan pedoman tentang bagaimana cara berperilaku di kehidupan sosial. Pedoman sosial diberlakukan di tengah masyarakat untuk mengatur cara berpikir dan bertindak individu agar sesuai dengan tujuan bersama yang menjadi alasan terciptanya konsensus diantara mereka. Penetapan aturan yang

berisikan pedoman tertentu secara tidak langsung menentukan pembentukan kehendak komunal.

Sebagaimana kesadaran komunal, kehendak komunal membuat keseragaman dalam kehidupan sosial. Tindakan-tindakan yang dilakukan berdasarkan kehendak komunal merupakan bagian dari suatu relasi kuasa. Struktur sosial mengendalikan kondisi sosial melalui relasi kuasa yang mengatur tindakan masyarakat di kehidupan sehari-hari. Setiap tindakan saling berhubungan dan mengintegrasikan individu dalam suatu relasi kuasa. Dengan demikian, kesadaran dan kehendak komunal dibentuk oleh struktur sosial tertentu untuk melanggengkan relasi kuasa yang sudah ada.

Peran sosial terbentuk karena masyarakat diarahkan oleh suatu nilai ideologis. Ideologi membenarkan apa yang diciptakan oleh sekelompok individu yang memiliki kepentingan melalui perumusan yang masuk akal. Pemaknaan sosial mengandung nilai ideologis tertentu sebagai “pengetahuan” yang bersifat umum. Dengan demikian, nilai ideologis tersebut mengabsahkan dirinya sendiri (*self-validating*). Masyarakat dikondisikan untuk tereduksi oleh nilai tertentu dan menjadi bagian dari institusi sosial yang berideologi.

3.2. Keragaman Nilai Ideologis dalam Kehidupan Sosial

Kehidupan sosial adalah kehidupan yang diisi oleh beragam ideologi beserta nilai ideologisnya. Nilai ideologis yang berbeda seringkali menjadi perdebatan dan ditandingkan satu sama lain. Perdebatan terjadi karena masing-masing nilai ideologis memiliki kepentingan berbeda namun saling bersinggungan. Setiap nilai ideologis berkompetisi untuk mendapatkan kekuasaan, sementara kekuasaan yang diperebutkan berada dalam kehidupan sosial yang sama.

Konsensus dalam kehidupan sosial bisa tercipta sebab individu-individu yang mendiaminya memiliki nilai dan tujuan yang sama. Bahkan setelah suatu konsensus terbentuk, masyarakat masih memegang nilai-nilai yang diyakininya supaya apa yang telah menjadi tujuan bersama tidak mengalami perubahan. Nilai yang berkembang di tengah masyarakat merupakan nilai yang diupayakan untuk dilestarikan dalam rangka menopang tujuan bersama, sehingga dengan kata lain nilai itu adalah nilai ideologis.

Nilai ideologis mempengaruhi individu dalam mempersepsikan, memutuskan, menyatakan dan bertindak dalam kehidupan sosial.

Identitas masyarakat pada dasarnya diberikan dan juga dipertahankan secara sosial, dan harus secara mantap demikian. Seorang tidak dapat menjadi bagian dari masyarakat jika semata-mata mengidentifikasikan dirinya tanpa mendapatkan pengalaman, informasi, dan pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Citra diri seseorang bisa dikatakan sebagai laki-laki atau perempuan, tua atau muda, baik atau jahat jika orang tersebut berada di dalam suatu konteks sosial di mana orang-orang lain bersedia mengakui identitasnya.

Identitas sosial menggambarkan pengetahuan individual seseorang yang mengungkapkan bahwa dirinya merupakan bagian dari komunitasnya. Perasaan kebersamaan kemudian menuntun individu untuk mengikuti nilai ideologis yang diyakini oleh komunitasnya. Karena individu merupakan bagian dari kelompok tertentu baik disadari maupun tidak, maka identitas sosialnya adalah bagaimana individu tersebut didefinisikan secara sosial.

Pembentukan identitas sosial di suatu komunitas masyarakat tidak terlepas dari struktur sosial. Struktur sosial menetapkan kategorisasi yang menyeleksi aspek-aspek tertentu dalam diri individu. Jika individu tidak sesuai dengan kategori yang ada dalam suatu struktur sosial, individu tersebut akan tersingkirkan. Kategori sosial mengklasifikasikan individu berdasarkan kebangsaan, etnik, agama, status, dan sebagainya. Proses pengklasifikasian menentukan terbentuknya identitas sosial seseorang. Dalam hal ini, identitas sosial yang terdapat dalam diri seorang individu menggambarkan struktur sosial tertentu.

3.2.a. Keragaman Karakter Manusia yang Menciptakan Nilai

Karakter manusia dalam konteks yang paling sederhana, yakni memahami secara benar perbedaan antara kebutuhan dan keinginan yang mengitari seorang manusia. Kebutuhan berarti sesuatu yang harus diperoleh agar seseorang dapat menjadi manusia yang lebih baik, lebih utuh dan lebih sempurna. Sedangkan keinginan adalah segala sesuatu yang diupayakan seorang manusia agar ia dapat merasakan kenikmatan, kesenangan, kepuasan atau kebanggaan.

Manusia sebagai pribadi tidak dirumuskan sebagai suatu kesatuan individu saja tanpa sekaligus menghubungkannya dengan lingkungan sekitarnya. Manusia tidak dapat dikategorikan ke dalam satu kesatuan individu saja atau sebagai seseorang yang tidak pernah bersinggungan dengan lingkungan. Manusia dalam kehidupan sosial berhubungan dengan konteks sosial yang dihadapinya dan struktur sosial yang mengendalikannya, baik secara langsung maupun tidak.

Suatu kepribadian akan menjadi kepribadian apabila keseluruhan sistem psikofisiknya termasuk bakat kecakapan dan ciri-ciri kegiatannya menyatakan sebagai kekhasan dirinya dalam penyesuaian dirinya dengan lingkungannya. Kepribadian individu, keahlian individu, ciri-ciri akan dirinya baru akan pengetahuan kepribadiannya ketika sudah melakukan interaksi dengan lingkungannya. Individu memerlukan hubungan dengan lingkungan yang menggiatkannya, merangsang perkembangannya, atau memberikan sesuatu yang informasi yang dibutuhkannya.

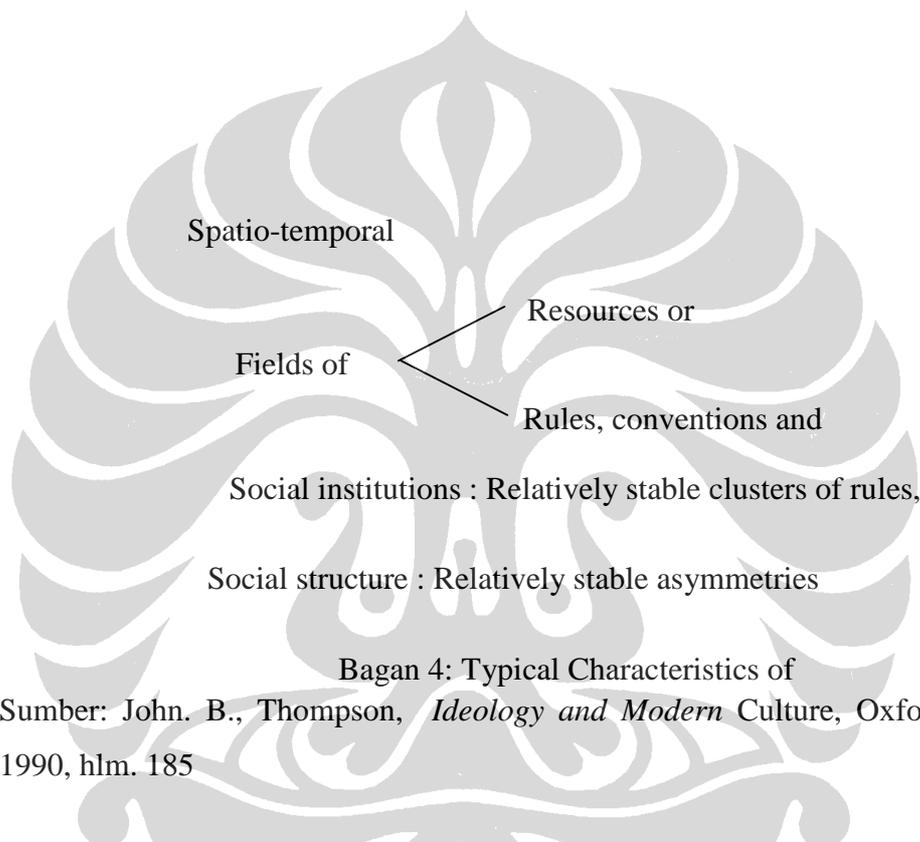
Manusia tidak hidup sendiri tetapi hidup bersama dalam masyarakat dan lingkungannya, maka dari itu identitas terbentuk. Hal ini terjadi karena manusia butuh pengenalan diri. Identitas juga hadir biar manusia dapat saling mengenal sesama dan dapat membedakan sesama. Setiap manusia memiliki pengetahuan individual dimana dia merasa sebagai bagian anggota kelompok yang memiliki kesamaan emosi serta nilai. Identitas bisa berbentuk kebangsaan, ras, etnik, kelas pekerja, agama, umur, gender, suku, keturunan, dan sebagainya. Kategori sosial yang ada dalam masyarakat ternyata tidak terbentuk secara sejajar, tapi juga menimbulkan status sosial dan kekuasaan.

3.2.b. Keragaman Ruang dan Waktu Sebagai Medium Pembentukan Nilai

Giddens menyatakan bahwa koordinasi waktu-ruang merupakan faktor yang lebih sentral bagi keberadaan hidup masyarakat daripada faktor material. Sebagai 'aliran hidup' (*duree of being*) 'waktu-eksistensial' (*existential time*) dirubah menjadi 'waktu-kosong' (*empty time*) yang bisa dimanipulasi, sehingga menghasilkan rutinitas yang dijalani individu berdasarkan perannya masing-masing dalam kehidupan sosial.

Dalam siklus sosial, terdapat keterpisahan atau jarak antara waktu dan tempat. Waktu dan tempat bertemu dalam suatu perentangan yang dipersatukan melalui sarana komunikasi yang semakin dipercepat perkembangan teknologi di masa globalisasi.

Giddens menyebut gejala ini sebagai 'pertentangan waktu-ruang' (*time-space distanciation*), yang sebenarnya berisi "pencabutan" waktu dari ruang. Pencabutan (*disembedding*) waktu dari ruang merupakan perbedaan antara masyarakat modern dan bukan-modern.



Bagan 4: Typical Characteristics of

Sumber: John. B., Thompson, *Ideology and Modern Culture*, Oxford: Polity Press, 1990, hlm. 185

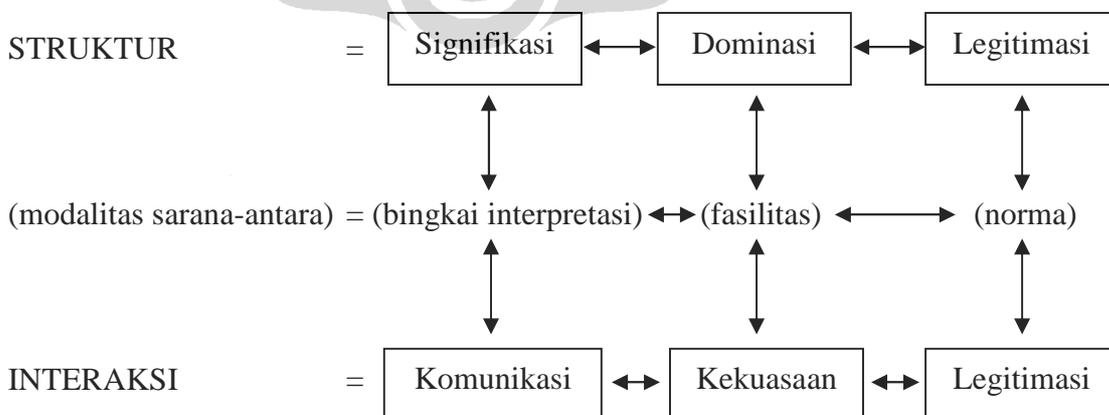
“Pencabutan“ waktu dari ruang juga telah memberi ciri yang selalu baru pada perkembangan kapitalisme. Waktu dan ruang direntang (*time-space distanciation*) dan sekaligus dipadatkan (*time-space compression*). Jika waktu dan ruang sebagai kondisi konstitutif praktik sosial mengalami transformasi yang mendalam, begitu juga yang terjadi pada praktik sosial. Dalam bahasa Giddens, “pencabutan“ waktu dari ruang itu melibatkan “pencabutan hubungan-hubungan sosial dari konteks lokal dan perubahan hubungan-hubungan itu ke arah rentang dan waktu yang tidak terbatas. Salah satu mekanisme institusional yang menjadi motor gejala “pencabutan“ hubungan sosial adalah 'alat simbolis' (*symbolic tokens*) yang termasuk dalam sistem abstrak (*abstract systems*). Giddens, menyatakan bahwa praktik sosial perlu dipahami dan dikembangkan

menurut informasi baru yang pada gilirannya mengubah praktik sosial tersebut secara konstitutif. Pemisahan waktu dari ruang seperti diurai di atas bukan hanya menyangkut pergeseran sifat temporal dan spasial hidup kita dalam arti filosofis, melainkan juga menyangkut transformasi yang mendalam pada bentuk (*form*) dan isi (*content*) praktik sosial kita.

3.2.c. Keragaman Institusi Sosial yang Mengorganisir Sistem Sosial

Kehidupan sosial tidak terlepas dari institusi sosial yang mengatur dan mengendalikan masyarakat dalam interaksi sosial. Struktur mirip 'pedoman' yang menjadi prinsip praktik-praktik di berbagai tempat dan waktu tersebut merupakan hasil perulangan berbagai tindakan masyarakat. Bagi Giddens, obyektivitas struktur tidak bersifat eksternal melainkan melekat pada tindakan dan praktik sosial yang kita lakukan. Struktur bukanlah benda melainkan "skemata yang hanya tampil dalam praktik sosial.

Giddens terutama melihat tiga gugus besar struktur. Pertama, struktur penandaan atau signifikasi (*signification*) yang menyangkut skemata simbolik, pemaknaan, penyebutan, dan wacana. Kedua, struktur penguasaan atau dominasi (*domination*) yang mencakup skemata penguasaan atas orang (politik) dan barang (ekonomi). Ketiga, struktur pembenaran atau legitimasi (*legitimation*) yang menyangkut skemata peraturan normatif, yang terungkap dalam tata hukum. Menurut Giddens ada tiga dimensi struktural sistem sosial, yakni signifikansi, dominasi dan legitimasi.¹⁰



¹⁰ B. Herry-Priyono, *Anthony Giddens*, Grafika, 2003, hlm.25

Bagan 4: Struktur dan Interaksi Sosial

Sumber: B. Herry-Priyono, *Anthony Giddens*, Grafika, 2003, hlm.38

Berdasarkan tabel di atas, modalitas strukturasi berfungsi menjelaskan dimensi-dimensi utama dualitas struktur dalam interaksi yang menghubungkan kapasitas yang diketahui dari para agen dengan sifat-sifat struktural. Skema interpretatif adalah cara-cara penetapan jenis yang dimasukkan dalam gudang pengetahuan aktor, yang secara refleksif diterapkan dalam melakukan komunikasi. Signifikansi adalah simbol-simbol yang disisipkan dalam urutan simbolis sebagai satu dimensi utama penggolongan institusi-institusi. Adapun dominasi adalah kondisi keberadaan kode-kode signifikansi. Sementara itu legitimasi merupakan skema peraturan normatif yang terungkap dalam tata hukum.¹¹

3.2.d. Keragaman Norma yang diikuti Oleh Masyarakat

Norma sosial adalah serangkaian nilai yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerja sama di antara mereka. Apabila anggota kelompok mengharapkan anggota-anggotanya berperilaku jujur dan terpercaya, mereka akan saling mempercayai. Dalam konteks ini, berarti norma sosial mengarahkan perilaku konsensual dan kerja sama yang juga di dalamnya terkandung kejujuran, pemenuhan tugas dan tanggung jawab, saling mengendalikan dan kesediaan untuk saling menolong.

Dalam berhubungan dan berinteraksi, manusia memiliki sifat yang khas yang dapat menjadikannya lebih baik. Kegiatan mendidik merupakan salah satu sifat yang khas yang dimiliki oleh manusia. Kecenderungan manusia untuk hidup berkelompok sebenarnya bukanlah sekedar suatu naluri atau keperluan yang diwariskan secara biologis semata-mata. Akan tetapi dalam kenyataannya manusia berkumpul sampai batas-batas tertentu juga menunjukkan adanya suatu ikatan sosial tertentu. Mereka berkumpul dan saling berinteraksi satu sama lain. Interaksi antar manusia merupakan suatu kebutuhan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Individu yang

¹¹ B. Herry-Priyono, *Ibid.*, hlm.26

satu pasti akan membutuhkan individu yang lain, karena seorang individu tidak akan bisa hidup sendiri tanpa bantuan individu lain. Jadi kehidupan berkelompok merupakan kebutuhan mutlak. Maka timbullah kelompok-kelompok sosial di dalam kehidupan manusia. Kelompok-kelompok sosial tersebut merupakan himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama.

Manusia sejak awal lahirnya adalah sebagai makhluk sosial. Makhluk yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia memerlukan mitra untuk mengembangkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sebagai individu, manusia dituntut untuk dapat mengenal serta memahami tanggung jawabnya bagi dirinya sendiri dan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dipahami dan disadari bahwa mosaik nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan ada yang berkualifikasi norma (*norm*) dan nilai (*value*). Skala keberlakuannya tergantung pada aspek waktu, ruang (tempat, dan kelompok sosial yang bersangkutan; sedangkan nilai (*value*) skala keberlakuannya lebih universal. Dalam tatanan masyarakat yang maju atau modern, maka nilai-nilai sosial dan yang bersifat universal mendominasi dan mengisi semua kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Manusia sebagai makhluk sosial dan berbudaya pada dasarnya dipengaruhi oleh nilai-nilai kemanusiaan. Dalam hal ini, nilai ideologis merupakan nilai yang terwujud dalam suatu jaringan, kepercayaan dan norma. Norma sosial merupakan aturan yang berfungsi untuk mengatur perilaku masyarakat. Norma dalam kehidupan sosial yang dikuasai oleh ideologi tertentu adalah perwujudan nilai ideologis dalam kehidupan sehari-hari yang dijalani oleh masyarakat.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa kehidupan sosial memiliki struktur sosial sebagai suatu bangunan sosial yang terdiri dari berbagai unsur pembentuk masyarakat. Setiap unsur dalam struktur sosial akan membentuk sistem atau pola hubungan yang menjadi inti dari struktur tersebut. Hubungan antar individu yang menghasilkan tatanan sosial menggambarkan status dan peran masing-masing. Hubungan ini pada dasarnya memunculkan proses sosialisasi dan juga pola interaksi dalam kehidupan sosial. Interaksi dalam kehidupan sosial seringkali tidak berlangsung secara alamiah melainkan dikondisikan dalam konteks sosial tertentu oleh kelompok yang memiliki kekuasaan. Masyarakat secara langsung maupun tidak, dipaksa untuk mempersepsi segala sesuatu berdasarkan pemaknaan sosial. Pemaknaan sosial terbentuk dan berkembang melalui nilai ideologis yang disalurkan melalui bahasa sehari-hari, sehingga masyarakat berkehendak dan bertindak berdasarkan kesadaran yang dikonsepsikan oleh ideologi tertentu. Akan tetapi, universalisasi yang diharapkan oleh pihak-pihak yang mendominasi selalu bersinggungan dengan kehidupan sosial yang beragam. Keragaman sosial dipengaruhi oleh karakter manusia, kondisi ruang dan waktu, serta institusi dan norma sosial. Kehidupan sosial yang beragam selalu melahirkan ideologi yang beragam pula, sehingga upaya universalisasi suatu ideologi dipertentangkan oleh masyarakat.

BAB 4

NILAI IDEOLOGIS DALAM FENOMENA PEMILIHAN UMUM SEBAGAI BAGIAN DARI FENOMENA SOSIAL DI INDONESIA

Dalam bab ini, penulis akan membahas tentang nilai ideologis dalam salah satu fenomena sosial di Indonesia, yaitu pemilihan umum. Pertama penulis akan menjelaskan pengertian pemilihan umum, serta fenomena pemilihan umum sebagai suatu fenomena yang meresentasikan nilai kesetaraan. Penulis akan menganalisa pemilihan umum sebagai sebuah simbol yang merepresentasikan nilai kesetaraan dengan menampilkan unsur kebebasan, persaingan dan keadilan. Pemilihan umum menjadi peristiwa yang fenomenal karena didukung oleh konteks budaya demokrasi. Kemudian penulis mengungkapkan bagaimana penyimpangan dari nilai kesetaraan dalam budaya demokrasi setelah pemilihan umum yang berupa praktik KKN yang merepresentasikan nilai kesewenang-wenangan.

4.1. Nilai Ideologis dalam Fenomena Pemilihan Umum

Pertama penulis ingin menjelaskan bagaimana pemilihan umum dapat dikategorikan sebagai suatu fenomena. Pemilihan umum yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali merupakan peristiwa yang ditunggu-tunggu oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Mereka sangat dalam melakukan persiapan penyelenggaraan pemilihan umum karena hanya sekali dalam lima tahun mereka berhak untuk memilih calon pemimpin yang sesuai dengan kehendak masing-masing individu. Antusiasme dan keterlibatan sebagian besar masyarakat menjadikan pemilihan umum sebagai peristiwa yang fenomenal.

Sebagai sebuah fenomena, pemilihan umum tidak hanya terdiri atas aspek material melainkan juga aspek metafisis berupa nilai ideologis. Masyarakat terpengaruh

oleh nilai-nilai tertentu untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Nilai-nilai tersebut membuat masyarakat yakin bahwa pemilihan umum akan membawa mereka pada kehidupan sosial yang lebih baik. Kesadaran masyarakat terbentuk secara kolektif dan mengarahkan mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang mendukung penyelenggaraan pemilihan umum. Masyarakat merasa bahwa mereka berhak untuk memilih dan menyalurkan aspirasi mereka melalui pemilihan umum, sehingga berkewajiban untuk berperan serta dalam menentukan siapa saja individu yang dianggap layak untuk menjabat sebagai wakil rakyat.

Neo-Marxisme menekankan bahwa sistem makna memiliki kekuatan dalam mengendalikan tindakan manusia sebagai pelaku sosial. Sebagaimana yang dikatakan oleh Giddens bahwa terdapat hubungan antara kehidupan sosial, sistem dan struktur, serta subyek pelaku (*agency*). Dalam *The Constitution of Society*, ia mengutamakan peran interpretasi dan sistem makna dalam kehidupan manusia. Masyarakat Indonesia sudah beralih ke masa pasca tradisional (*post-traditional*). Kondisi sosial di Indonesia telah berubah sejak masa reformasi. Transformasi atau perubahan sosial yang terjadi merupakan bagian dari upaya bersama untuk keluar dari budaya ketiktatoran yang diterapkan selama masa pemerintahan Orde Baru. Akses informasi sebagai bagian dari interaksi sosial menjadi tidak terbatas melalui maraknya media masa yang berkembang ditambah dengan kecepatan teknologi. Hal tersebut menyebabkan pemaknaan sosial tidak lagi dikendalikan oleh pemerintah, melainkan masyarakat itu sendiri sebagai bagian dari rakyat Indonesia.

Nilai ideologis yang terdapat dalam pemilihan umum membuat masyarakat berpikir bahwa bangsa Indonesia membutuhkan pemilihan umum sebagai sarana penyeleksian wakil rakyat. Kehidupan sosial yang setara dalam akan terwujud dalam pemilihan umum yang merepresentasikan nilai kesetaraan dan mengutamakan kebebasan, persaingan, dan keadilan. Nilai kesetaraan menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam pemilihan umum yang mendukung kelangsungan sistem demokrasi liberal di Indonesia pasca Orde Baru. Melalui interaksi antar individu dalam kehidupan bermasyarakat, nilai kesetaraan terus-menerus tersebarluaskan. Kemudian nilai kesetaraan membentuk suatu sistem pemaknaan sosial yang menekankan pada hak asasi manusia (HAM) dan kesempatan yang sama dalam kehidupan bersama.

Pemaknaan tersebut membuat masyarakat memaknai pemilihan umum sebagai proses yang mengakomodasi aspirasi rakyat Indonesia yang akan terwujud dalam pemerintahan—yang dipimpin oleh para wakil rakyat yang terpilih—lima tahun kedepan.

Keruntuhan Orde Baru memunculkan wacana publik bahwa kehidupan berpolitik tidak hanya dapat dibahas dan dimaknai oleh rezim penguasa saja, namun dapat dibicarakan dengan bebas oleh semua lapisan masyarakat sebagai warga negara Indonesia. Kenyataan ini membuat masyarakat menyadari bahwa diperlukan kesetaraan diantara mereka dalam menjalani kehidupan berpolitik. Kesetaraan menjadi nilai yang dikembangkan dalam pemilihan umum pertama yang tidak lagi dimonopoli oleh Partai Golongan Karya pada tahun 2004. Masyarakat secara bersama-sama berupaya membangun kembali negara ini melalui pemaknaan sosial-politik yang lebih bebas. Dengan demikian, terjadi perubahan perspektif dalam kehidupan sosial dari pemerintahan pusat (*government centrism*) menjadi pemerintahan bersama yang mengutamakan rakyat (*the people*). Masyarakat memiliki haknya kembali untuk berperan dalam perpolitikan di Indonesia.

4.1.a. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah proses pemilihan individu-individu untuk mengisi posisi tertentu dalam pemerintahan, seperti presiden beserta wakil presiden dan anggota legislatif di tingkat pemerintahan pusat dan daerah. Tujuan dari Pemilihan Umum adalah memilih para wakil rakyat yang akan mengisi posisi tertentu dalam lembaga perwakilan rakyat. Pemilihan umum diselenggarakan untuk menemukan kehendak bersama dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh rakyat dalam mengekspresikan aspirasi mereka. Pemilihan umum merupakan suatu proses yang mengakomodir rakyat Indonesia untuk memilih individu-individu yang akan menjadi wakil rakyat. Pemilihan umum menggunakan cara-cara yang demokratis untuk memilih perwakilan rakyat yang sah (*legitimate*). Pemilihan umum diselenggarakan sebagai sarana untuk transfer kekuasaan dari rakyat kepada pemimpin yang terpilih. Keterwakilan hak politik rakyat terwujud melalui pemilihan umum.

Pemilihan umum memuat persetujuan bahwa kekuasaan yang berasal dari rakyat beralih menjadi kekuasaan negara. Negara yang dipimpin oleh wakil rakyat memiliki kekuasaan yang sah untuk mengatur kehidupan rakyatnya karena sudah disepakati dalam pemilihan umum. Kesepakatan dalam pemilihan umum menghasilkan konsensus berupa negara sebagai lembaga perwakilan rakyat yang berhak untuk menetapkan kebijakan-kebijakan sosial. Dengan kata lain, pemilihan umum melegitimasi kekuasaan yang berada pada negara dan para wakil rakyat.

Dalam *The Third Wave*, Samuel P. Huntington menjelaskan: Pemilihan umum yang terbuka, bebas, dan jujur merupakan esensi demokrasi, suatu syarat hakiki yang tidak-dapat-diabaikan. Pemerintahan yang dihasilkan oleh pemilihan umum mungkin tidak efisien, korup, picik, tidak bertanggung-jawab, didominasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu, dan tidak mampu mengambil kebijakan-kebijakan yang dituntut oleh kebaikan publik. Sifat-sifat ini menjadikan pemerintahan seperti itu tidak-diinginkan, namun tidak menjadikannya tidak-demokratis.¹²

Rakyat berkesempatan untuk memberikan suaranya secara bebas melalui pemilihan umum, yakni memilih di antara para calon beserta partai politik dengan berbagai janji, harapan, dan program kebijakan yang ditawarkan. Pemilihan umum merupakan persaingan terbuka di antara kekuatan sosial dan kelompok politik dalam ada mencapai kekuasaan. Keterbukaan dalam proses pemilihan umum mengesahkan kesepakatan bersama atas sistem pemerintahan yang akan berlangsung lima tahun ke depan, sekalipun sistem pemerintahan itu tidak sesuai dengan harapan yang ada sebelumnya.

4.1.b. Fenomena Pemilihan Umum Merepresentasikan Nilai Kesetaraan

Penulis akan menganalisa fenomena pemilihan umum dari sudut pandang hermeneutik karena fenomena Pemilihan Umum menampilkan simbol-simbol yang membutuhkan interpretasi kritis. Sebagai bagian dari fenomena sosial, fenomena Pemilihan Umum berhubungan dengan kedirian manusia yang kompleks dan dinamis. Manusia mengaktualisasikan dirinya melalui benda, teks, simbol, dan fenomena sosial

¹² Marc F. Plattner, *Liberalisme dan Demokrasi (Dua Hal yang Tidak Terpisahkan)*. (diterjemahkan oleh Yusi A. Pareanom dan A. Zaim Rofiqi), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.,hlm.32

yang terus mengalami perubahan seiring dengan perubahan dirinya. Dalam proses pengaktualisasian diri, manusia seringkali terjebak dalam kesadaran kolektif yang sempit dan kehilangan kesadaran murninya. Oleh karena itu, penulis mencoba untuk menginterpretasi fenomena pemilihan umum melalui metode hermeneutik, sehingga dapat memperoleh pengetahuan yang mendalam dan menyeluruh tentang manusia, nilai-nilai yang diyakininya, dan tingkah lakunya dalam kehidupan sosial.

Menurut Dilthey, interpretasi tidak sekedar menemukan apa yang ada di pikiran seseorang, melainkan juga memberikan gambaran tentang situasi intelektual dan lingkungan sosial yang membentuknya. Sebagai studi kebudayaan, hermeneutika juga dikembangkan oleh Gadamer dan Ricoeur yang membangun metodologi interpretasi dengan perangkat teori eksistensialisme dan fenomenologis yang mereka kembangkan. Keduanya menekankan rekonstruksi sistem-sistem makna yang menjadi basis informasi. Selain bersifat personal dan psikologis, sistem-sistem makna ini bisa diletakan dalam konteks budaya yang lebih luas yang digunakan pengarang dalam penciptaan teks. Rekonstruksi penting bagi pembentukan kerangka atau cakrawala tafsir (*horizon of interpretation*).¹³ Ricoeur menerapkan fenomenologi pada bahasa atau memindahkan fenomenologi ke dalam hermeneutik dan menggarisbawahi konsep tentang "*indirectly and dialectically*" daripada "*directly and univocally*". Dengan menentukan seperangkat ekspresi simbolik, manusia akan dapat memahami dirinya dengan lebih baik. Simbol sebagai jalan "secara tidak langsung" atau "pranata" dan melalui konstitusi interpretasi akan membawa cakrawala hermeneutik fenomenologi.¹⁴

Pemilihan umum secara general dipahami sebagai peristiwa yang menentukan individu-individu yang akan mengabdikan sebagai wakil rakyat di lembaga pemerintahan. Akan tetapi, mengapa pemilihan harus dilaksanakan melalui pemilihan umum? Padahal banyak cara-cara lain yang bisa dilakukan untuk memilih para wakil rakyat. Penulis beranggapan bahwa masyarakat memiliki nilai ideologis yang mendorongnya untuk berperan dalam menyelenggarakan pemilihan umum, yaitu nilai kesetaraan. Dalam pemilihan umum, semua rakyat Indonesia berada pada posisi yang setara sebagai warga negara. Berdasarkan pengalaman historis bangsa Indonesia, penyeleksian wakil rakyat

¹³ Mudji Sutrisno, *Op. Cit*, hlm. 210-11

¹⁴ Meliono- Budianto., Irmayanti. *Ideologi Budaya*, Jakarta: Yayasan Kota Kita, 2004, hlm. 37

dengan cara lain—seperti yang terjadi pada masa Kerajaan Tradisional, Orde Lama, dan Orde Baru—hanya memberikan kesempatan kepada individu tertentu saja untuk berkuasa, atau tidak memberikan kesempatan yang setara. Rakyat merasa kecewa dengan sistem penyeleksian pada pemerintahan sebelumnya yang hanya berpihak pada kalangan tertentu. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat Indonesia lebih memilih pemilihan umum sebagai wadah penyeleksian wakil rakyat.

Penulis mengasumsikan bahwa Orde Baru merupakan suatu bentuk hegemoni kekuasaan karena pemerintah berupaya untuk mengendalikan interaksi sosial dalam pemaknaan sosial yang sempit. Pemaknaan sosial yang berkembang pada masa itu menggambarkan bahwa pemerintah sudah membawa banyak perkembangan di bidang pembangunan dan tidak terdapat perilaku menyimpang dari pemerintah yang bisa merugikan rakyat. Kepemimpinan seumur hidup oleh seorang presiden beserta partai politiknya merupakan suatu kewajaran. Pemerintah tidak hanya mengatur kehidupan bernegara tetapi juga menguasai kesadaran masyarakat dalam mengembangkan relasi kuasanya. Oleh karena itu, aktivitas perpolitikan pasca reformasi merupakan counter-hegemoni yang berupaya 'mendekonstruksi' ataupun 'mendedifikasi' doktrin yang terdapat dalam konsep politik pada masa sebelumnya.

Berbeda dengan pemilihan umum pada masa Orde Baru, pemilihan umum sejak tahun 2004 hanya memperbolehkan presiden terpilih menjabat selama dua periode atau sepuluh tahun, sehingga kemungkinan presiden bersikap diktator akan semakin kecil sebab masa jabatan yang terbatas. Aturan tersebut membuka kesempatan yang lebih besar bagi setiap individu untuk terpilih sebagai wakil rakyat. Kenyataan ini membuat kekuasaan tetap bisa dipantau oleh rakyat melalui kepemimpinan yang silih berganti. Evaluasi kepemimpinan yang dilakukan selama lima tahun sekali melalui pemilihan umum menjadikan rakyat setara dengan wakil rakyat di lembaga pemerintahan.

Dalam konteks sosial di Indonesia pada saat ini, nilai kesetaraan membentuk suatu pemaknaan sosial di tengah kehidupan bermasyarakat setelah reformasi. Pemaknaan sosial atau pandangan umum mencerminkan gagasan dari kepentingan kelas yang berkuasa. Dalam fenomena pemilihan umum, pandangan umum yang beredar di tengah masyarakat adalah pandangan para pelaku politik yang memiliki kepentingan politis, yaitu untuk mendapatkan kekuasaan dari rakyat secara sah melalui proses

pemilihan umum. Proses pemilihan umum yang diawali dengan kegiatan kampanye partai politik mendorong rakyat melihat (memahami) identitas bangsa melalui kaca mata partai-partai politik tertentu.

1) Pemilihan Umum Sebagai Sebuah ‘Simbol’

Pemilihan umum sebagai sebuah fenomena menampilkan kehendak untuk memilih dan dipilih. Kehendak tersebut tidak hanya kehendak perorangan, melainkan kehendak kolektif yang terwujud dalam bentuk partai politik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ricoeur bahwa kehendak manusia (subyek) tidak terlepas dari konteks sosial yang berkembang di sekitarnya (struktural). Subjek dalam teks merujuk pada dirinya sendiri (*self-referential*) melalui hubungan kompleks internal dan struktural teks itu sendiri. Manusia mengaktualisasikan dirinya dalam fenomena sosial yang didiami oleh manusia-manusia lain dengan pemaknaan sosial tertentu, sehingga ia seringkali berkehendak berdasarkan kesetaraan yang terberikan (*given*). Kehendak manusia untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, pada dasarnya merepresentasikan ‘Kesetaraan’ yang ingin dicapai bersama. ‘Kesetaraan’ terjadi saat setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berperan sebagai rakyat yang memilih (menentukan) dan yang mencalonkan diri untuk dipilih (ditentukan).

Symbol is a sign, that like every sign it intends something beyond and stands for this something. But not every sign is a symbol. Symbol conceals in its intention a double intentionality. There is, first, the primary or literal intentionality, which, like any meaningful intentionality, implies the triumph of the conventional sign over the natural sign: this is the stain, the deviation the weight—words which do not resemble the thing signified.¹⁵

Masyarakat berusaha merealisasikan nilai kebebasan melalui berbagai cara, salah satunya adalah dengan menyelenggarakan pemilihan umum secara langsung untuk

¹⁵ Paul Ricoeur, *Ibid.*, hlm.289

memilih calon presiden dan calon legislatif. Melalui pemilihan umum yang berdasarkan atas konsep demokrasi, individu dari lapisan masyarakat apapun memiliki kesempatan untuk mencalonkan diri. Dalam hal ini, pemilihan umum adalah tanda sekaligus simbol yang mencerminkan kebebasan semua masyarakat agar dapat berperan dalam pemerintahan.

Pemilihan umum adalah simbol dari kesetaraan bersama dalam kehidupan bernegara. Pelaksanaan pemilihan umum membuat masyarakat menghadiri tempat pemilihan secara serentak dalam satu hari. Pemilihan dilakukan dalam ruangan yang sedikit tertutup agar masyarakat bebas memilih tanpa sepengetahuan orang lain. Setelah proses pemilihan selesai, hasil suara dihitung secara terbuka melalui KPU (Komisi Pemilihan Umum), sehingga masyarakat bisa menyaksikan selama proses penghitungan dilakukan. Kenyataan tersebut menggambarkan kebebasan masyarakat dalam memilih para calon yang akan mewakili mereka di kursi pemerintahan.

Kebebasan dalam memilih juga didukung oleh keberagaman calon presiden dan calon legislatif yang ditawarkan. Mereka yang mencalonkan diri datang dari berbagai latarbelakang kesukuan, agama, profesi, status sosial, dan sebagainya. Bahkan sebagian dari mereka adalah orang-orang yang baru pertamakali mencalonkan diri dan belum punya banyak pengalaman di bidang perpolitikan. Namun perbedaan tersebut tidak mengurangi antusiasme masyarakat terhadap Pemilihan Umum. Meskipun masyarakat cenderung untuk memilih para calon wakil rakyat ataupun partai politik berdasarkan persamaan di antara mereka. Latarbelakang yang sama membuat masyarakat merasa bahwa calon tersebut memahami kesulitan yang mereka hadapi selama ini dan akan membawa perubahan sebagaimana yang mereka kehendaki bersama. Sebagian besar masyarakat yakin bahwa dirinya akan terbebas dari permasalahan yang membelenggu mereka selama ini apabila mereka berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Masyarakat memaknai pemilihan umum sebagai upaya mencapai kebebasan. Pemilihan umum merupakan sarana yang dibutuhkan masyarakat agar mendapatkan kesempatan yang setara. Terwujudnya kesetaraan kesempatan berhubungan dengan nilai kebebasan yang dijunjung tinggi dalam kehidupan sosial di sini dan pada masa ini. Kebebasan adalah alasan dan tujuan dari diselenggarakannya pemilihan umum.

Pemilihan umum dilaksanakan kerana masyarakat menghendaki kebebasan sebagai bagian dari konsensus bersama. Fenomena pemilihan umum adalah fenomena yang melayani kebebasan dalam rangka membangun sistem pemerintahan yang lebih baik. Pemilihan umum merepresentasikan nilai kebebasan dalam suatu relasi sosial di tengah masyarakat. Sebagai suatu proses penyeleksian, Pemilihan Umum menjadi bagian dari sistem demokrasi atas dasar kebebasan melalui kehendak masyarakat untuk mencapai kesetaraan sosial.

2) Kesetaraan: Kebebasan, Persaingan dan Keadilan

Dalam pandangan hermeneutik, masyarakat pada awalnya berada dalam posisi yang berjarak (*distansiasi*). Nilai ideologis yang dikemukakan oleh suatu partai politik tertentu merupakan sesuatu yang asing, sehingga ada jarak antara nilai tersebut dengan masyarakat. Pada tahap ini, *distansiasi* di antara keduanya membuka kemungkinan terbentuknya suatu makna yang tidak terbatas. Sebagian besar masyarakat tidak memiliki hubungan yang cukup dekat dengan partai politik, sebab mereka tidak berkecimpung di bidang politik. Kemungkinan besar mereka tidak memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kehidupan berpolitik, sehingga tidak memiliki cukup kepedulian terhadap permasalahan perpolitikan.

Akan tetapi, *distansiasi* selalu mengandaikan *apropriasi* atau sebuah konsep tentang aktualisasi makna dari teks, fenomena atau peristiwa) karena masyarakat akan menginterpretasi (*interpretation*) keberadaan partai politik. Interpretasi masyarakat pada partai politik biasanya terjadi pada masa-masa menjelang pemilihan umum. Pada masa tersebut, masyarakat merasa memiliki kepentingan dengan partai politik karena mereka membutuhkan sarana untuk menyalurkan aspirasi dan hak mereka dalam pemilihan umum. Selain itu, masyarakat pun akan terbawa oleh suasana kampanye yang dilakukan oleh para calon wakil rakyat, sehingga pikiran mereka cenderung untuk terdoktrinasi oleh slogan dan moto partai yang muncul di jalan-jalan, layar televisi, media cetak, dan sebagainya.

Dalam fenomena Pemilihan Umum, *apropriasi* terjadi ketika sebagian masyarakat—yang mulanya asing dengan suatu nilai ideologis dari partai politik—menyatakan bahwa dirinya bersedia untuk mendukung calon wakil rakyat ataupun partai

politik tertentu. Nilai ideologis dari partai politik menjadi nilai ideologis suatu kelompok masyarakat melalui proses *apropriasi* yang termanifestasikan dalam kesadaran masyarakat karena makna yang terbentuk merupakan makna yang mendukung kepentingan partai politik untuk mencapai kekuasaan.

Para partai politik mentransfer nilai ideologis mereka melalui kampanye dengan mengarahkan rakyat pada kesadaran palsu terhadap realitas perpolitikan di Indonesia. Rakyat dialihkan (*displaced*)¹⁶ dengan janji-janji yang menawarkan suatu perubahan yang lebih baik dari kondisi saat ini. Dalam hal ini, rakyat diberikan suatu harapan agar kehidupannya dapat mengalami peningkatan secara signifikan jika mereka memilih salah satu calon dari partai politik tertentu. Janji-janji yang ditawarkan merupakan komoditas yang menggambarkan sosok pemimpin yang ideal.

Dibalik janji-janji tersebut terdapat nilai ideologis tertentu yang memungkinkan para calon untuk mendapatkan kekuasaan yang mereka inginkan. Sebagai sebuah komoditas, janji-janji itu tentunya disesuaikan dengan permintaan rakyat terhadap sosok pemimpin di Indonesia pada saat ini, yaitu pemimpin yang bisa mengatasi permasalahan globalisasi, krisis ekonomi, pluralisme, kesenjangan sosial, dan sebagainya. Fenomena pemilihan umum memiliki nilai ideologis di dalamnya karena terdapat individu-individu yang mempunyai kepentingan untuk berkuasa, dan tingkat kemungkinan untuk mendapatkan kekuasaan yang mereka inginkan ditentukan melalui serangkaian proses dalam pemilihan umum.

Symbols are things that stand for other things, many of which are hidden or, at least, not obvious. A symbol can stand for an institution, a mode of thought, an idea, a wish—any number of things. Heroes and heroines are often symbolic and can be interpreted, then, in terms of all the things they stand for. Many of these are connected to our bodies and to natural processes. What makes matters particularly complicated is the

¹⁶ *Displacement* adalah istilah yang digunakan oleh Freud; bila kecemasan ditekan, baik secara psikologis maupun ideologis, maka perhatian terhadap hal tersebut hanya bisa dinyatakan dengan dialihkan dalam bentuk yang bisa diterima secara sosial.

*fact that the logic behind symbolization is not the same logic we use in our everyday reasoning processes.*¹⁷

Berbagai atribut dan iklan selama kampanye menampilkan sosok pemimpin yang ideal bagi bangsa ini berdasarkan versi masing-masing partai politik. Misalnya pemimpin yang ideal menurut Partai Demokrat adalah pemimpin yang jujur dan bersih dari tindakan korupsi, menurut Partai Golongan Karya adalah pemimpin yang cepat dan tepat dalam mengambil keputusan, sedangkan menurut Partai PDIP adalah pemimpin yang memperhatikan kebutuhan rakyat kecil (wong cilik). Masing-masing partai menawarkan (memproduksi) konsep kepemimpinan yang berbeda dengan nilai ideologisnya masing-masing. Namun, konsep kepemimpinan yang ditawarkan tidak selalu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh setiap warga negara, sehingga tidak semua aspirasi rakyat dapat sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam beberapa partai politik tersebut. Keterbatasan calon presiden dan anggota legislatif yang tersedia membuat sebagian rakyat terpaksa memilih para calon yang sebenarnya tidak dikehendai. Sebagian rakyat yang tidak bisa menentukan pilihan karena tidak sesuai dengan para calon yang ditawarkan, seringkali dimanfaatkan oleh berbagai kampanye partai politik yang mempersuasi mereka untuk memilih calon tertentu.

Penerimaan begitu saja oleh sebagian rakyat—karena pengetahuan politiknya kurang, akses informasi politiknya terbatas, atau mudah terpengaruh oleh iklan selama kampanye—terhadap komoditas yang ditawarkan oleh partai politik merupakan bagian dari hegemonisasi yang dilakukan oleh kelas berkuasa, yaitu para calon dan partai politik mereka. Dalam hal ini, rakyat berpartisipasi dalam hegemoni sebab mereka merasa menjadi bagian dari ideologi politik yang ditawarkan oleh suatu partai. Rakyat membantu memenangkan kesepakatan atas dirinya sendiri dan orang lain dalam sebuah relasi kuasa yang dikendalikan oleh para calon bersama partai politiknya. Sistem perpolitikan selama Pemilihan Umum menjadikan rakyat sebagai konsumen sekaligus pihak yang mereproduksi nilai ideologis suatu partai politik.

Namun, disamping itu masih ada sekelompok individu yang mengaktualisasikan eksistensi dirinya dalam bentuk lain. Mereka yang tidak bersedia untuk bergabung

¹⁷ Paul Ricoeur, *Op. Cit.*, hlm. 273

dalam partai politik manapun akan menyatakan dirinya untuk golput (golongan putih) yang tidak memilih calon wakil rakyat atau partai politik apapun dalam pemilihan umum. Golongan putih berada dalam posisi kontra terhadap nilai-nilai ideologis yang ditawarkan selama masa kampanye. Ketidakberpihakan mereka juga dikarenakan mereka sudah merasa kecewa dan tidak percaya lagi dengan calon wakil rakyat atau partai politik. Mereka yang tidak berkehendak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum merupakan kelompok counter-hegemoni dalam kehidupan berpolitik di Indonesia.

4.2. Terselenggaranya Pemilihan Umum didukung Oleh Konteks Budaya Demokrasi

Hal yang utama dalam demokrasi adalah kenyataan bahwa rakyat memiliki hak untuk mempengaruhi keputusan melalui wakilnya. Oleh karena itu, proses pemilihan wakil rakyat itu menjadi tujuan utama pengaturan demokrasi. Peran rakyat adalah menghasilkan suatu pemerintahan, atau suatu badan perantara yang pada giliran berikutnya akan menghasilkan eksekutif atau pemerintahan nasional. Secara definitif, demokrasi adalah pengaturan kelembagaan untuk mencapai keputusan politik di mana para individu meraih kekuasaan untuk menentukan melalui suatu perjuangan kompetitif dalam pemungutan suara rakyat. Kompetisi kepemimpinan ini sangat ditekankan penulis tersebut, di samping lima aspek lain yang bisa ditarik dari pengertian klasik demokrasi, dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kompetisi yang bebas untuk memberikan suara secara bebas pula.

Demokrasi adalah kekuasaan ada di tangan rakyat, berbeda dengan monarki (kekuasaan satu orang), aristokrasi (kekuasaan orang yang terbaik) dan oligarki (kekuasaan ada pada sebagian orang). Pemilihan wakil rakyat dan pejabat publik lainnya adalah mekanisme utama yang dengannya rakyat menjalankan kekuasaannya. Kini demokrasi diartikan sebagai hak pilih yang dimiliki semua rakyat secara umum untuk mengemban sebuah jabatan. Oleh karena itu, pemilihan umum dianggap sebagai aspek populer dan utama dari demokrasi liberal masa kini.¹⁸

¹⁸ Marc F. Plattner, *Ibid.*, hlm. 104

Saat ini, kebebasan adalah nilai yang diupayakan untuk ditampilkan dalam setiap aspek kehidupan sosial budaya di Indonesia, terutama dalam dunia perpolitikan. Sejak terjadi demonstrasi besar-besaran pada tahun 1998, masyarakat berusaha untuk mengembangkan sistem reformasi yang mengutamakan kebebasan. Kebebasan menjadi landasan utama dalam membangun sistem perpolitikan yang baru. Masyarakat mengharapkan pemerintahan yang lebih baik dari pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan yang otoriter di bawah kekuasaan Orde Baru. Ketika tindakan tersebut sudah tidak ada lagi, masyarakat akan mencapai kebebasan dalam menyuarakan aspirasinya, mendapatkan hak sepantasnya dan sebagainya. Kebebasan adalah jalan bagi masyarakat menuju kesetaraan. Konteks sosial pasca reformasi mendorong masyarakat untuk menerima nilai kebebasan dan berupaya mewujudkannya bagi kebaikan bersama.

Tujuan pemilihan umum bukan sekadar memenangkan perolehan suara atau mendominasi kekuatan di legislatif. Pemilihan umum diharapkan melahirkan pemerintahan yang secara demokratis memperoleh legitimasi rakyat. Agar hal tersebut tercapai, maka harus ditunjang oleh kesiapan partai politik, penyelenggara pemilihan umum, dan kesiapan para calon wakil rakyat untuk menafsirkan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.

4. 3. Penyimpangan dari Nilai Kesetaraan dalam Budaya Demokrasi Setelah Pemilihan umum Berupa Praktik KKN

Penyaluran kekuasaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah setelah pemilihan umum 2004 menyebabkan desentralisasi dan pemekaran sangat marak di Indonesia ini. Bersamaan dengan itu, sentimen-sentimen kedaerahan, tradisi, “putra daerah” sering dihembuskan. Pembentukan kabupaten dan propinsi baru, sebagian besar didasari oleh sentimen kedaerahan. Pranata pembentukan baru dengan kemasan nilai-nilai etnisitas lokal, beserta sistem hirarki dalam pembagian status dan peran, yang sebenarnya sudah lama mati, atau bahkan tidak pernah ada sama sekali. Kerajaan, kesultanan atau bentuk pemerintahan tradisional lain yang hampir pasti sudah lama ditinggalkan, tiba-tiba “dihidupkan” kembali.

Dalam konteks perilaku seperti ini, revitalisasi “nilai-nilai budaya” justru merupakan ancaman bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan

dan akuntabel. Pranata tradisional bentukan baru, hanya akan memperkuat raja-raja lokal pemungut rente tidak saja dengan kekuatan formal, namun juga legitimasi tradisional. Dalam konteks perilaku seperti ini, revitalisasi “nilai-nilai budaya” justru merupakan ancaman bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel. Pranata tradisional bentukan baru, hanya akan memperkuat raja-raja lokal pemungut rente tidak saja dengan kekuatan formal, namun juga legitimasi tradisional.¹⁹

Korupsi sulit diberantas karena memang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Perilaku korupsi sudah menjadi kebiasaan dalam bangsa ini. Sifat feodalisme yang dimiliki bangsa Indonesia selama berabad-abad akibat dari penjajahan kemudian memberikan banyak kontribusi terhadap terjadinya korupsi. Misalnya saja dalam hal suap-menyuap, seringkali dari kita terdidik untuk mendapatkan hal yang instan dengan cara yang mudah, hingga akhirnya terjadilah praktek suap. Sama juga dengan nepotisme di mana dalam keluarga kita dibentuk untuk mendahulukan keluarga dibanding yang lainnya. Karena sudah menjadi kebiasaan itulah maka perilaku KKN ini sulit dirubah.²⁰

Konteks budaya yang melestarikan praktek korupsi adalah sifat kekeluargaan yang ditunjukkan melalui silaturahmi. Memberikan hadiah merupakan hal yang terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, praktik tersebut seringkali disalahgunakan oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab agar kepentingan mereka yang berhubungan dengan lembaga pemerintahan dapat dipermudah. Budaya feodalisme yang mengakar di masyarakat menyebabkan masyarakat tidak lagi menyadari bahwa melakukan penyuaipan dan pemanipulasian bisa merugikan masyarakat luas.

The characteristics of corruption are as follows: (a) Corruption always involves more than one person. This need not be the case with stealing, for instance, or embezzlement. (b) Corruption on the whole involves secrecy, except where it has become so rampant and so deeply rooted that some powerful individuals or those under their protection

¹⁹Frenky Simanjuntak dan Anita Rahman Akbarsyah, *Membedah Fenomena Korupsi*, Jakarta: Transparency International, 2007, hlm.34

²⁰ Frenky Simanjuntak dan Anita Rahman Akbarsyah, *Ibid.*, hlm.33

would not bother to hide their activity. (c) Corruption involves an element of mutual obligation and mutual benefit. The obligation or benefit need not always be pecuniary. (d) Those who practice corrupt methods usually attempt to camouflage their activities by resorting to some form of lawful justification. They avoid any open clash with the law. (e) Those who are involved in corruption are those who want definite decisions and those who are able to influence those decisions. (f) Any act of corruption involves deception, usually of the public body or society at large. (g) Any form of corruption is a betrayal of trust. (h) Any form of corruption involves a contradictory dual function of those who are committing the act. When an official is bribed to issue a business licence by the party who offers a "gift", the act of issuing the licence is a function of both his office and his self-interest.²¹

Menurut Alatas tindakan "pemberian hadiah" merupakan "lembaga universal". Namun, tindakan tersebut tidak dapat didefinisikan sebagai kebiasaan buruk yang sudah menjadi "tradisi" suatu komunitas sosial, tindakan itu menjadi buruk karena terdapat motivasi dan tujuan di dalamnya. Oleh karena itu diperlukan penetapan kebijakan yang dapat mendefinisikan kebiasaan-kebiasaan tertentu ke dalam tindakan korupsi atau bukan. Kejelasan sangat diperlukan dalam memisahkan antara budaya dengan perilaku korupsi yang berupa pedoman nilai "ucapan terima kasih". Keduanya memang berhubungan, tetapi budaya 'memberi' bukanlah suatu keburukan dan tidak perlu dihilangkan. Sebaliknya, justru praktik KKN yang mengatasnamakan budaya itu adalah tindakan yang salah.

Hubungan seperti persahabatan dan keluarga antara pejabat dengan pengusaha atau siapapun juga pada dasarnya tidak secara otomatis menunjukkan adanya KKN. Tindakan KKN karena banyak hal yang mempengaruhi individu untuk melakukannya. Kehidupan sosial yang dipenuhi oleh beragam nilai cenderung untuk mengarahkan masyarakat pada berbagai tindakan yang berbeda. Praktik KKN yang berdasarkan atas

²¹ Syed Hussein Alatas, *The Sociology of Corruption (The Nature, Function, Cause and Prevention of Corruption)*, Singapore: Donald More Press, 1968, hlm.12-4

sifat mengutamakan kepentingan pribadi merupakan sesuatu yang bersebrangan dengan nilai kesetaraan dalam budaya demokrasi. Dengan kata lain, KKN adalah penyimpangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia pasca reformasi. Penyimpangan tersebut terjadi karena keragaman nilai dalam kebudayaan Indonesia, sehingga tindakan masyarakat sebagai pengaktualisasian diri merangkap tidak homogen.

4.3.b. Nilai Kesewenang-wenangan dalam Praktik KKN

Korupsi merupakan penggunaan secara korup dari kekuasaan yang dialihkan berdasarkan wewenang yang melekat pada kekuasaan itu dan berdasarkan kemampuan formal, dengan merugikan tujuan kekuasaan yang sebenarnya dan dengan menguntungkan diri sendiri dengan dalih menggunakan kekuasaan itu dengan sah. Beberapa unsur-unsur definisi korupsi, antara lain: Korupsi terjadi ketika kekuasaan dialihkan (*derived power*).²² Senturia mendefinisikan korupsi politik sebagai “menyalahgunakan kekuasaan negara untuk keuntungan pribadi.”²³ Lingkungan yang mendukung berkembangnya tindakan korupsi adalah kehadiran birokrasi, tidak saja dalam bentuk-bentuknya yang tradisional di masa lampau, tetapi juga dalam bentuk-bentuknya yang baru, yang memakai kedok birokrasi modern, seperti badan pengawas keuangan negara, inspektur jenderal di setiap kementerian, parlemen, hakim, penuntut umum, dan sebagainya.²⁴

Dalam hal ini, kekuasaan dipakai berdasarkan wewenang, atau berdasarkan kemampuan formal, meskipun penggunaan kekuasaan secara korup tidak sah menurut hukum, namun pemegang kekuasaan itu dengan mudah dapat menimbulkan kesan seakan-akan sah adanya. Kesan tersebut menguntungkan dirinya tindakannya tidak sejalan dengan kewenangan yang sudah diberikan oleh rakyat. Dengan kata lain, para wakil rakyat mempergunakan kekuasaan secara sewenang-wenang untuk tujuan yang berbeda demi kepentingan pribadi.

KKN sebagai suatu tindakan merupakan bagian dari pengaktualisasian diri secara eksistensial. Dalam konteks sosial, nilai kesewenang-wenangan demi pemenuhan

²² Mochtar Lubis dan James C. Scott, *Korupsi* LP3ES. Jakarta. 1988. hlm.5.

²³ Joseph J. Senturia, *Political Corruption*, dalam Edwin R. A. Seligman, et. Al., *Encyclopedia of the Social Science*, Jilid IV, London, 1931, hlm. 448-452.

²⁴ Mochtar Lubis dan James C. Scott, hlm. Xix.

kepuasan pribadi jelas bertentangan dengan konsensus bersama. Konsensus berupa kenegaraan yang diterapkan di Indonesia menempatkan manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kebebasan, namun kebebasannya terbatas pada norma-norma tertentu agar tidak menghalangi kebebasan orang lain. Keegoisan individu yang melakukan praktik KKN seharusnya tidak mungkin diterima di negara ini, tetapi permasalahannya adalah praktik demikian masih tetap ada sehingga terjadi ketidakadilan sosial?

Tindakan KKN adalah kejahatan yang di dalamnya terdapat simbol-simbol, seperti berkurangnya aset negara untuk alasan yang tidak jelas, citra negatif dari bangsa lain, kesenjangan sosial yang semakin tinggi, dan sebagainya. Simbol tersebut oleh Ricoeur dinamakan dengan noda (*defilement*). Selain noda, Ricoeur juga membahas kejahatan dengan menjelaskan keberadaan dosa (*sin*) dan kebersalahan (*guilt*). KKN sebagai tindakan yang merugikan orang lain merupakan dosa dan menyalahi norma sosial. Namun demikian sulit untuk menemukan bahwa mereka yang melakukan KKN merasa sebagai orang yang berdosa dan bersalah, terutama karena sudah ada rasionalisasi atau pembenaran oleh institusi sosial terhadap perbuatan mereka. Kesadaran mereka yang sudah terdoktrinasi oleh nilai yang menghalalkan kesewenang-wenangan membuat mereka merasa bahwa melakukan KKN adalah suatu kewajiban. Dalam hal ini, sudah terjadi hegemonisasi yang mengutamakan kepentingan para birokrat untuk melanggengkan kekuasaannya.

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa kehidupan yang terwujudkan melalui fenomena pemilihan umum dipenuhi oleh nilai-nilai yang silih berganti, mulai dari nilai kesetaraan menjadi nilai kesewenang-wenangan yang terungkap setelah para calon wakil rakyat terpilih. Fenomena pemilihan umum juga memanipulasi nilai kesetaraan selama masa kampanye dalam kemasan iklan, bosor, dan sebagainya. Propaganda yang dilakukan oleh partai politik untuk mencapai kekuasaan mempengaruhi pemahaman, persepsi, dan keyakinan masyarakat dengan mereduksi

kesadaran individual mereka pada kesadaran palsu. Kursi pemerintahan dan surat suara dijadikan komoditas yang memuat pengetahuan palsu (*pseudo knowledge*). Para calon wakil rakyat berusaha melakukan hegemonisasi dalam kehidupan berpolitik dengan mempersuasi masyarakat untuk mempercayai bahwa mereka mendukung nilai kesetaraan, namun pada kenyataannya tidak selalu seperti itu, terbukti dengan maraknya praktik korupsi yang tidak pernah surut walaupun upaya pemberantasan sudah dilakukan.



BAB 5

PENUTUP

Keberadaan ideologi dalam kehidupan sosial membentuk suatu dinamika sosial. Dinamika terbentuk karena ideologi selalu bertendensi untuk melakukan universalisasi nilai dalam interaksi sosial untuk menjaga relasi kuasa yang ada, sedangkan kehidupan sosial dipenuhi oleh keragaman karakter manusia, perubahan ruang dan waktu, serta perbedaan institusi dan norma sosial. Keduanya memiliki hubungan yang saling berkesinambungan, akan tetapi memiliki sifat yang bertentangan satu sama lain. Teraktualisasinya ideologi yang memiliki kecenderungan untuk menyeragamkan segala sesuatu selalu bertentangan dengan realitas sosial yang tidak mungkin diseragamkan. Oleh karena itu, setiap ideologi membangun pemaknaan sosial yang mengarahkan